

**PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM
DAN POLITIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S.Sos) Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

AKBAR MUKADDAM

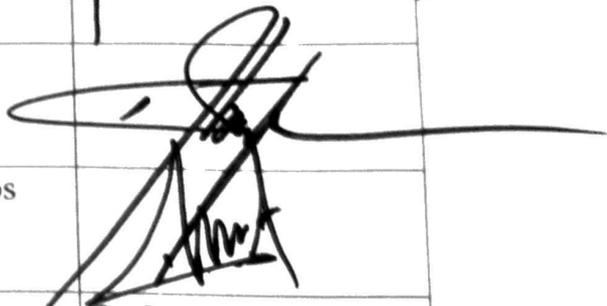
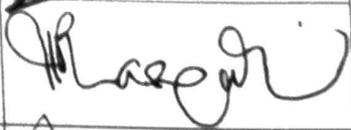
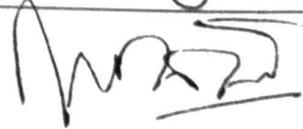
NIM: 19.2.17.0009

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (PPI)
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Akbar Mukaddam NIM. 19.21.00.09 dengan judul **“PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA”**, yang telah berhasil di ujikan didepan dewan Penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal, 27 Februari 2024 yang bertepatan dengan hari Nishfu Sya’ban 1445 H dipandang bahwa Skripsi ini telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Serjana Sosial (S.SOS) Jurusan Pemikiran Politik Islam dengan beberapa perbaikan.

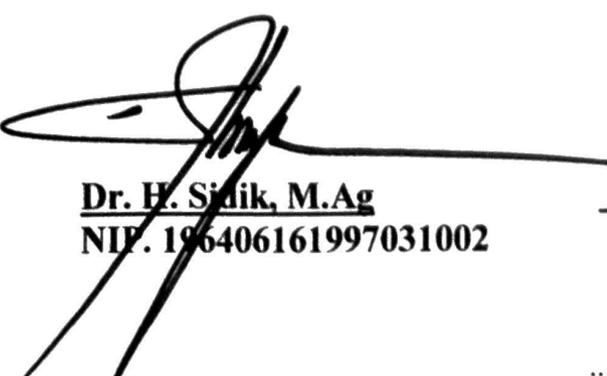
DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Fachriza Ariyadi, M. Si	
Penguji Utama	Dr. H. Sidik, M.Ag	
Penguji II	Muhammad Taufik, M.Sos	
Pembimbing I	HJ. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I	
Pembimbing II	Noorwahid Sofjan, S.I.P., M.A	

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah

Ketua Prodi
Pemikiran Politik Islam


Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 196406161997031002


Muhammad Taufik, M.Sos
NIP. 198604222019031002

...

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA**” benar adalah karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 25 Februari 2024

Penulis



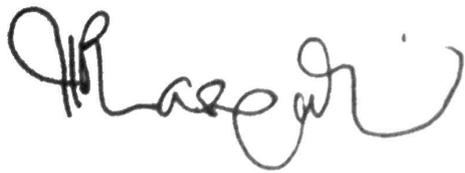

AKBAR MUKADDAM
NIM: 19.2.17.0009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Politik di Indonesia” Oleh Saudara Akbar Mukaddam NIM 192170009, Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing Pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 6 Sya’ban 1445 H
25 Februari 2024 M

Pembimbing I



HJ. NURHAYATI, S.Ag., M. Fil. I
NIP.19690525 200312 2 001

Pembimbing II



NOORWAHID SOFJAN, S.I.P., M.A
NIP. 198501006 201801 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, merupakan kata paling penting pantas penulis ucapkan kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan petunjuk serta karunia-nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa selalu setia dalam pengembangan islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan, baik moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah Gazalik Yusuf L dan ibu Isnawati Djufri Dg. Lembah yang telah membersarkan dan memberikan dukungan moral maupun material selama penulisan skripsi ini.
2. Prof. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu seluruh pimpinan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan kebijakan bagi mahasiswa.
3. Dr. H. Sidik, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), ibu Dr. Suraya Attami, S.Ag.,M.Th.I. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
4. Bapak Muhammad Taufikm M.Sos. Selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI), Fachrizal Ariyadi, M. SI. Selaku Sekretaris Jurusan

Pemikiran Politik Islam (PPI) UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.

5. Ibu HJ. Nurhayati, S.Ag., M. Fil. I selaku Pembimbing I dan bapak Noorwahid Sofjan, S.I.P., M.A selaku Pembimbing II yang telah ikhlas memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga sesuai dengan yang diharapkan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh tenaga kependidikan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas membagi ilmu dan memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
7. Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai S.E.,M.M., Beserta seluruh staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Para informan yang telah bersedia memberikan informasi sebagai data dalam penelitian skripsi ini.
9. Saudara/saudariku beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis selalu sabar dan tegar dalam menjalankan hidup, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt.
10. Rekan domisioner Dema Universitas UIN Datokarama Palu yang senantiasa memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

11. Untuk orang special Novianti S.Pd yang selalu memberikan support dan senantiasa mendampingi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan namanya satu persatu. Untuk semua orang yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa mendoakan semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunia-nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSERTUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar Isi Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Riwayat Mohammad Natsir	10
C. Peran dan Kiprah Mohammad Natsir Pasca Kemerdekaan	12
D. Peran dan Kiprah Mohammad Natsir Pasca Nasakom	15
E. Kajian Teoritis	16
F. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III KIPRAH POLITIK DI INDONESIA	
A. Kiprah Politik Mohammad Natsir Pra Kemerdekaan dan Pra Nasakom	24
B. Kiprah Politik Mohammad Natsir Pasca Kemerdekaan	38
C. Kiprah Politik Mohammad Natsir Pasca Nasakom	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	42

B. Pemikiran Politik Mohammad Natsir tentang Hubungan Islam dan Negara	49
C. Islam Sebagai Dasar Negara	53
D. Debat Soekarno Tentang Pancasila.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Biodata Penulis
Lampiran II	Dokumentasi
Lampiran III	Surat Pengajuan Pembimbing Skripsi
Lampiran IV	Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	Kartu Seminar Proposal Skripsi

ABSTRAK

Nama : AKBAR MUKADDAM
Nim : 19.2.17.0009
Judul Skripsi :PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA.

Skripsi ini membahas tentang Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Dan Politik Di Indonesia dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana kiprah politik Mohammad Natsir di Indonesia? (2) Bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Politik di Indonesia?

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan prosedur pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dengan bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan teknis triangulasi.

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa kiprah politik Mohammad Natsir di Indonesia yaitu dengan menggunakan ideology keislaman seperti yang dikatakannya yaitu bagaimana pun bentuk negaranya tetapi Negara dan rakyat tetap harus menggunakan ideology islam dalam berkehidupan sehari-hari karena islam merupakan pondasi dari segala aturan. Adapun mengenai Islam dan politik di Indonesia merupakan satu kesatuan yang dapat berjalan searah karena islam merupakan pedoman atau landasan dari segala urusan berkehidupan termasuk juga politik.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: sekiranya pihak kampus dapat lebih menyediakan buku-buku sejarah politik agar dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan skripsi secara lebih lengkap, serta perpustakaan daerah dapat dijadikan tempat penelitian dan pengambilan informasi mengenai sejarah-sejarah politik serta informasi mengenai judul-judul skripsimahasiswa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammad Natsir lahir di Sumatera Barat, Pada tanggal 17 Juli 1908, tepatnya di kota Alahan Panjang,¹ Muhammad Natsir terlahir sebagai anak keempat dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Khadijah dan Muhammad Idris Sultan Saripado.² Beliau juga dikenal dengan sebutan Pak Natsir.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia, tempat dimana tokoh-tokoh besar Indonesia berasal. Beberapa tokoh pemikir ataupun pejuang Islam muncul dari daerah tersebut, Seperti Imam Bonjol, H. Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Buya Hamka, dan Mohammad Natsir, mereka adalah tokoh intelektual yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat³.

Pada tahun 1927, Mohammad Natsir melanjutkan pendidikannya di Al-Agemene Middelbare School. Sebelumnya Mohammad Natsir telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertamanya pada sekolah HIS dan MULO di daerah Minangkabau.⁴ Dimana daerah ini juga Mohammad Natsir belajar ilmu agama yang dipimpin seorang ulama yang bernama Tuan Mondo Amin.

¹Muhammad Basir Syam, 'Sinergitas Pemikiran Natsir Di Bidang, Teologi, Pendidikan Dan Politik: Suatu Kajian Perspektif Pemikiran Politik Islam', *The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, (Jakarta: Jurnal, 2016), 163-72

² Falah, Saiful. *Rindu pendidikan dan kepemimpinan M. Natsir republika* (Yogyakarta: PT. Cyber Indonesia, 2012)

³Basyaib, Hamid, *Perjalanan Politik Islam dari Prapemilu' sampai Pemilihan Presiden*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999)

⁴ Setyaningsih, Emi "perjuangan dan pemikiran politik mohammad natsir (Jakarta: Jurnal teropong aspirasi politik islam, 2016) 73-94.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Deliar Noer, mencatat bahwa daerah Sumatera Barat memegang peranan penting dalam penyebaran cita-cita pembaruan Pemikiran Islam ke daerah lain. Muhammad Natsir mulai berkenalan dengan Pemikiran-Pemikiran Islam modern pada Pendidikan formalnya di sekolah HIS Adabiyah Padang⁵. Sekolah modern yang didirikan Dr. H. Abdullah Ahmad

Dr. H. Abdullah Ahmad adalah salah seorang pembaruan di Minangkabau yang banyak menyebarkan gagasan-gagasan Muhammad Abduh⁶. Di sekolah modern HIS Adabiyah Padang, Mohammad Natsir mulai belajar dan mengembangkan wawasan keislamannya melalui gagasan Tokoh-tokoh pembaruan Islam Modern.

Ketertarikan Mohammad Natsir terhadap politik dan keagamaan perlahan mulai tumbuh. Meskipun beliau sepenuhnya menempuh pendidikan Barat di sekolah-sekolah Belanda,⁷ namun hal tersebut membuat minat Mohammad Natsir untuk mengkaji ilmu pengetahuan keislaman tidak pernah padam.

Semangat belajar Mohammad Natsir terbentur sulitnya mendapatkan buku, yang kebanyakan buku-buku asing. Hal ini mendorong Mohammad Natsir untuk mempelajari beberapa bahasa asing seperti bahasa Belanda, bahasa Arab, Inggris dan Prancis⁸. Karena ketekunan dalam belajar menjadikan berbagai buku yang diperlukan, yang ditulis dalam bahasa-bahasa itu dapat beliau deskripsikan.

⁵Abdillah, M. *Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (Bandung: Prenada Media, 2015), 33

⁶Berlian, P. S, *Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Surabaya: jurnal 2012), 14

⁷Faqieh, Moh, dan Raji Mukhtar, *sastra sebagai transmisi untuk membentuk nilai keislaman dan nasionalisme rakyat Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 56

⁸Ibid, 57

Kepribadian Mohammad Natsir yang ramah dan tutur katanya yang halus menjadikan beliau berteman dengan siapa saja, termasuk dengan mereka yang berbeda pandangan.⁹ Dalam pandangan Mohammad Natsir manusia harus menghargai adanya perbedaan.

Mohammad Natsir pernah menjabat Menteri Penerangan sebanyak tiga kali dan satu kali menjadi Perdana Menteri, tetapi itu tidak membuat beliau jauh dari rakyat kecil.¹⁰ Mohammad Natsir adalah tokoh yang sederhana, kehidupannya jauh dari kesan istimewa dengan pemikiran emasnya membuat Mohammad Natsir dihormati dan disegani dunia.

Pemikiran Politik Mohammad Natsir tentang penyautan Islam yang menginginkan terbentuknya negara yang berlandaskan Islam tetap saja belum mendapatkan tempat di hati sebagian besar masyarakat islam. Bahkan hingga saat ini, Islam tetap saja berada pada posisi yang termaginalkan dalam dunia Perpolitikan Indonesia yang malah mendekati sekularisasi.¹¹

Oleh karena itu, menurut Mohammad Natsir, untuk mengatur negara dan masyarakatnya, maka Islam harus menjadi idiologi negara.¹² Hal tersebut karena Mohammad Natsir beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral islam yang didalamnya mengandung falsafah hidup.

⁹Efendi, Bujang. *Etika politik islam indonesia Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir*, (Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017),22

¹⁰Ahmad Fauzie Natsir, "Kenangan Tentang Aba", dalam Lukman Hakiem, *Berdamai Dengan Sejarah* (Jakarta: Republik 2008), 4.

¹¹ Iskandar, Irwan, *Tentang Hubungan Islam dan Negara Transnasional* (Surabaya: Jurnal, 2015), 1755.

¹²Agustian, T, *Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabir* (Jakarta: Jurnal Studi Keislaman, 2020), 7-24.

Ketertarikan penulis mengangkat judul "*Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Politik di Indonesia*" ini adalah dimana penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pribadi dan Pemikiran Mohammad Natsir. Sosok Mohammad Natsir menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan meneladani sikap-sikapnya. Sebagai seorang manusia Muslim, Mohammad Natsir tetap berpegang pada ajaran agama dalam setiap langkah dan pemikirannya, baik negara maupun kemajuan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kiprah politik Mohammad Natsir di Indonesia ?
2. Bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Politik di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kiprah politik Mohammad Natsir di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Politik di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkungan masyarakat serta mahasiswa yang sedang menjalani masa studi. Dan juga penelitian ini diharapkan sebagai rujukan bagi peneliti yang relevan dengan penelitian ini.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan bias menjadi bahan rujukan bagi pembaca untuk mengembangkan pengetahuan tentang pemikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan Politik di Indonesia agar kiranya dapat dijadikan media pembelajaran dan menambah pengetahuan mengenai pemikiran politik islam.

D. Penegasan Istilah

Demi Menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang terkandung dalam Judul Proposal/Skripsi ini, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan Istilah dengan tujuan memberikan gambaran umum terhadap ruang lingkup pembahasan.

1. Pengertian Pemikiran dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah Proses, Cara, Perbuatan Memikir.
2. Islam merupakan agama yang universal, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin serta membawa konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya.
3. Pengertian Politik dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Politik ialah (Pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (Seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).
- b. Politik ialah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya), mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
- c. Politik ialah cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹³

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Proposal Skripsi ini, maka Penulis mengemukakan beberapa yang menjadi sistematika pembahasan dalam Proposal Skripsi ini, dimana secara umum mengacu pada sistematika yang berlaku di UIN Datokarama Palu yaitu:

Bab pertama sebagai pendahuluan dimana penulis mengemukakan beberapa hal pokok dengan mengetengahkan landasan pembahasan ini. Hal tersebut terlihat pada latar belakang masalah, selain itu pula dikemukakan pokok permasalahan dari rumusan masalah yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian disertai dengan penegasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan yang menguraikan tentang susunan bab dan sub bab untuk mempermudah bagi pemahaman pembaca.

¹³Ridwan, *Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Prespektif Pemikiran Hasan Al-Banna*, (Universitas Muhammadiyah Malang: Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume, 2017), 223

Bab kedua Terdiri dari penelitian terdahulu, dan kajian yang menjadi acuan penelitian ini. Untuk kajian teoritis terdiri atas uraian tentang: Pemikiran Mohammad Natsir tentang islam dan politik di indonesia

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang memuat pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab empat membahas tentang hasil dari penelitian yang berisi tentang Pemikiran Mohammad Natsir tentang islam dan politik di indonesia

Bab lima membahas tentang kesimpulan penulis, dalam melakukan penelitian beserta saran-saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini yang berkenaan dengan Pemikiran Politik Islam yang akan dikembangkan melalui Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir, untuk mengetahui sesuatu yang belum diteliti dan segala sesuatu yang perlu dikembangkan maka dilakukan Kajian terhadap buku-buku dan penelitian yang membahas berkenaan dengan Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Politik di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Konsep dan Implementasi Pemikiran Mohammad Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia” yang diteliti oleh *Isti Karamah Universitas Muhammadiyah Mataram (2021)*¹ Skripsi ini memaparkan bahwa negara dalam pemikiran Mohammad Natsir berfungsi sebagai alat dalam menjalankan syariat Islam. Menurutnya dengan Islam, negara akan memiliki akar yang kuat mengenai bentuk negara. Mohammad Natsir tidak terpaku dengan bentuk negara apapun, baginya bentuk apa saja boleh asalkan syariat Islam tetap dijalankan.

¹ Isti Karamah “*Konsep dan Implementasi Pemikiran Mohammad Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia*” (Universitas Muhammadiyah Mataram) 2021

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Konsep dan Implementasi Pemikiran Mohammad Natsir sangatlah berpengaruh terhadap umat muslim di Indonesia Paska Perang Kemerdekaan Indonesia. Persamaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian yang dibahas ialah sama-sama membahas tentang pemikiran Mohammad Natsir sedangkan perbedaanya ialah penelitian yang dilakukan oleh Isti Karamah mendeskripsikan tentang Konsep Inplementasi Pemikiran Mohammad Natsir Paska Perang Kemerdekaan Indonesia sedangkan yang peneliti lakukan ialah Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Politik di Indonesia.

2. Penelitian yang berjudul “Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Dasar Negara” Oleh *Herguita Immas Raspati Universitas Negeri Yogyakarta*¹⁵ Skripsi ini memaparkan pandangan Mohammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara, bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti sholat atau puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaidah-kaidah dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Nampaknya Mohammad Natsir ingin menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan agama dan negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral, hal ini karena dalam pemahaman Mohammad Natsir bahwa Islam ajaran yang lengkap.

¹⁵Herguita Immas Raspati, *Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Dasar Negara*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 79.

Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Menjelaskan Pulah Tentang Dasar-Dasar Negara. Persamaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian yang dibahas ialah sama-sama membahas tentang pemikiran Mohammad Natsir sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Herguita Immas Raspati mendeskripsikan tentang Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Dasar Negara sedangkan yang peneliti lakukan ialah Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Politik di Indonesia.

B. Riwayat Mohammad Natsir

Mohammad Natsir dilahirkan ke dunia pada hari Jumat tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 M di kota Jembatan Ukir Alahan Panjang yang bersebelahan dengan Lembah Kecamatan Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado sebagai perwakilan regulator di Maninjau yang kemudian berubah menjadi pengawas atau penjaga penjara. di Bekeru, Sulawesi Selatan. Sedangkan ibunya bernama Khadijah sebagai kerabat Chaniago.¹⁶

Mohammad Natsir dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, seorang Muslim yang tulus, seperti ayahnya, seorang Muslim yang tunduk pada pedoman yang ketat. Seperti orang Minang lainnya, itu ciri khasnya. M. Natsir dipandang sebagai anak muda yang berani mengambil kesempatan untuk mengaji dan belajar agama, baik pagi, petang, maupun petang. M. Natsir memiliki tiga saudara kandung, tepatnya Yukiman, Rubiah, dan Yohanusun. dia tinggal bersama saudara

¹⁶ M. Dzulfikridin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010), 11.

kandungnya dan orang tuanya. Bahkan sebagai sosialisasi yang ketat dan ilmiah untuk waktu yang sangat lama, dari tahun 1916 hingga 1927, baik di Alahan Panjang maupun di Padang¹⁷

Kemudian, pada tahun 1927 ia pindah ke Bandung untuk membina agama dan kecerdasannya, sehingga pada tahun 1934 ia bertemu Judoh dengan seorang wanita bernama Nurnahar yang akhirnya menjadi pasangannya sebagai teman hidup M. Natsir pada tanggal 20 Oktober 1934 di Bandung. . Dengan pernikahan tersebut, M. Natsir mendapatkan gelar Datuk Sinaro Panjang sebagai adat Minangkabau yang gelar tersebut diberikan setelah menikah.¹⁸

Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai enam orang anak, yaitu Siti Mukhlisah 20 Maret 1936, Abu Hanifah 20 April 1937, Asma Farida 17 Maret 1939, Dra. Hasanah Faizah 5 Mei 1941, Drs. Asyatul Asrah 20 Mei 1942, dan Ir. Ahmad Fauzi 26 April 1944. Keenam keturunan M. Natsir, tidak ada satupun yang meneruskan permintaan perjuangan ayahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ayahnya adalah tipe dunia sampai kematiannya. Maka kebetulan, banyak orang menyebut Nurcholis Madjid, pembaharu pemikiran Islam menjelang akhir abad ke-20, sebagai M. Natsir yang masih muda.¹⁹

Mohammad Natsir wafat pada 14 Sya'ban 1413 H. bertepatan dengan 6 Februari 1993 M. di RS Cipto Mangun Kusumo, Jakarta pada usia 85 tahun. Setelah M. Natsir mangkat, ia benar-benar menjadi berita yang layak diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik, seperti halnya komentar yang berbeda,

¹⁷ Ibid, 11.

¹⁸ M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010), 14.

¹⁹ Ibid, 15.

baik dari orang kepercayaannya di senjata maupun saingan politik, kelebihan dan kekurangan pemerintahannya. Namun yang menarik, Mohammad Natsir adalah anak terbaik Indonesia yang berjuang untuk agama dan negara Indonesia.²⁰

C. Peran dan Kiprah Mohammad Natsir Pasca Kemerdekaan

Sejarah perjuangan dan perjalanan politik Indonesia melahirkan sejumlah tokoh, yang memiliki reputasi, kharisma dan keteladanan yang melegenda. Diantara tokoh-tokoh tersebut misalnya Soekarno, Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Cokroaminoto, dan sebagainya, termasuk Mohammad Natsir.²¹ Mohammad Natsir adalah tokoh pemikir dan pejuang yang menyelamatkan negeri ini dari perpecahan.

Mohammad Natsir tak pernah berhenti berpikir dan berjuang untuk ummatnya, bahkan saat menjelang ajal menjemputnya, ia terus berpikir dan berjuang untuk umatnya yang sangat dicintainya. Mohammad Natsir bukan hanya seorang penulis dan aktifis, lebih dari pada itu Mohammad Natsir adalah seorang tokoh intelektual sekaligus ulama yang kharismatik, guru yang hebat, pemikir bangsa yang cerdas dan sebagai jurnalistik yang kritis.²²

Mohammad Natsir diakui sebagai tokoh handal sebagai Pemikir, Intelektual, Pujangga, dan Negarawan. Ia tidak hanya terampil menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun ia bertindak secara nyata. Buktinya,

²⁰ Ibid, 16.

²¹ FURKON, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun* (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 98.

²² Yuzril Ihza Mahendra, *M. Natsir Tokoh yang Konsisten dengan Perjuangan*, (Jakarta: Deefublish, 2020), 7.

selain pernah mengetuai Jong Islamiten Bond (JIB) di Bandung, tahun 1928-1932.²³

Mohammad Natsir pernah pula aktif di Partai Islam Indonesia (PII) dan PERSIS. Di dunia pendidikan, Mohammad Natsir sempat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung, sebuah bentuk pendidikan Islam modern yang bernafas agama. Di Persis ini Mohammad Natsir menjadi direktur selama 10 tahun sejak 1932.²⁴

Mohammad Natsir pernah pula menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung, 1940-1942. Ia pernah aktif sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) 1945-1946.²⁵ Kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan tiga periode pada era Kabinet Sahrir dan Hatta sejak 1946-1949.

Kemudian menjadi Ketua DPP Masyumi 1949-1958. Pada saat Indonesia menjadi negara Serikat (RIS), sebagai produk Konferensi Meja Bundar (KMB). Mohammad Natsir menolak tawaran Bung Hatta menjadi PM negara bagian RI di Jogja.²⁶ Namun Mohammad Natsir tetap melakukan lobby selama dua setengah bulan menghubungi negara bagian lainnya, agar membubarkan diri dan bersatu kembali dengan negara kesatuan RI di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Keterlibatan di organisasi dan terutama di politik memberikan dilema tersendiri bagi Mohammad Natsir karena harus meninggalkan Pendidikan Islam

²³ Ajip Rosidi, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Baru Indonesia*, (Bandung: Jurnal Mizan. 2010), 6.

²⁴ Anwar Harjono, *Pengantar Dalam Abibullah Djaini Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996), 9.

²⁵ Furkon, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun 1945-1958*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 22.

²⁶ *Ibid*, 22.

yang didirikannya namun, di sini ketenangan dan kematangan Mohammad Natsir menentukan pilihan dibuktikan.

Mohammad Natsir melontarkan mosi yang memungkinkan RI bersatu kembali, Mosi ini sangat populer dan dikenal dengan nama "Mosi Integral Mohammad Natsir". Atas jasanya ini, Soekarno mengangkat Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri.²⁷ Mohammad Natsir merupakan Perdana Menteri Pertama RI. Ini adalah jenjang karir politik Mohammad Natsir tertinggi sepanjang hidupnya. Meski bukan akhir pengabdianya pada bangsa dan negara.

Konsistensi Mohammad Natsir telah menjadikannya sebagai tokoh yang paling kompleks di antara para tokoh nasional Indonesia, untuk itulah karya tentang beliau tidak pernah tuntas.²⁸ Ketika Mohammad Natsir tidak lagi menjadi seorang politikus dalam pengertian orang partai, beliau mengambil jalan dakwah sebagai jalan untuk melanjutkan perjuangannya, namun dengan sikap pejuang yang di miliki Mohammad Natsir dalam arti bahwa berjuang tidak ada akhirnya.

Bukti perjuangan Mohammad Natsir dalam Dakwah, Politik serta mengenyam Pendidikan sampai di sekolah Belanda *Algemeene Middelbare School* (AMS) membuatnya melek terhadap dampak buruk penjajahan di Indonesia. dimana Dampaknya Mohammad Natsir berhasil mengambil hati jutaan rakyat Indonesia dan menyelamatkan negara dari ambang perpecahan.²⁹

Sejak Orde Baru tidak adalagi pejuang, namun yang ada hanyalah penikmat penikmat kemerdekaan. Tidak ada lagi pejuang-pejuang kemerdekaan,

²⁷ FURKON, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun 1945-1958*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 23.

²⁸ Ibid, 23.

²⁹ Ibid, 23.

dan itulah makna dari kemerosotan akhlak dan etika. Sebagian instansi pemerintah, masih penuh dengan koruptor karena di sana tidak ada etika. Itulah sebenarnya yang mau di bangun oleh Mohammad Natsir lewat dakwah dan kaitannya dengan etika politik.³⁰

D. Peran dan Kiprah Mohammad Natsir Pasca Nasakom

Pada tahun 1958 dengan adanya peristiwa ketika Mohammad Natsir mengkritik keras gagasan nasakom (Nasionalis, Agama Komunis) yang diprakarsai Presiden Soekarno saat mengumumkan dekret 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Mohammad Natsir mengejam kebijakan ini dan sebagai seorang diktator.³¹

Peranan Mohammad Natsir yang mewakili Islam, berusaha menentang arus sekularisme yang dihembuskan nasionalisme sekuler yang diwakili Ir. Soekarno. Melalui kumpulan tulisannya yang berjudul Persatuan Agama dan Negara Mohammad Natsir menyangkal argumentasi Ir. Soekarno yang dimuat dalam artikel Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Negara.³²

Dengan dipublikasikannya Persatuan Agama dan Negara tersebut Mohammad Natsir memulai perjuangannya untuk memperkenalkan pemikiran politiknya dalam menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perpolitikan Indonesia.³³

³⁰ Anhar, *Tragedi di Tengah Krisis Transisional, Dalam Lukman M. Natsir di Panggung Sejarah Republik. Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir.* (Jakarta: Jurnal Anhar, 2008), 25.

³¹ FURKON, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun 1945-1958*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 23.

³² Ibid, 24.

³³ Irwan, *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara.* *Jurnal Transnasional*, (Bandung: Jurnal Internasional, 2015), 1756.

E. Kajian Teoritis

Kajian teori atau juga yang disebut dengan landasan teori merupakan serangkaian konsep definitif, dan juga prespektif mengenai satu hal yang tersusun rapi. Kajian teori ini menjadi hal yang penting di dalam sebuah penelitian karna menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang bisa digunakan dalam membantu penelitian dan memberikan makna terhadap suatu data.

Menurut Hanna Arendt, manusia politik adalah manusia tindakan. Berbicara, bertindak dalam sebuah ruang publik yang *pluralistik*, dimana seluruh anggota berada pada sebuah tataran *equality*. Namun tentunya manusia tidak akan bisa bertindak apabila tidak bebas.³⁴

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan unsur utama teori tindakan Hannah Arend adalah kebebasan dan pluritas yang termaktub dalam ruang publik dan privat, ucapan, tindakan, penyingkapan, dan kekuasaan. Kebebasan menurut hannah arend adalah kapasitas untuk memulai, mengawali sesuatu yang baru, tindakan tak terduga, yang diberikan kepada manusia sejak dilahirkan. Hal ini bertolak dari fakta kelahiran manusia sebagai kondisi bagi kemungkinan munculnya kebaruan. Inisiatif para praktisi politik semestinya mampu melahirkan sesuatu melahirkan sesuatu yang baru dan dapat membawa keuntungan bagi publik.

³⁴ Fatih, Moh Khoirul, *kebebasan, pluritas, politik dalam pemikiran hanna Arend* (Bandung: Gramedia, 2022), 59-65.

1. Pemikiran Politik

Pemikiran politik pada dasarnya merupakan bagian terpenting dalam politik, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun dalam pengaplikasiannya dalam belahan bumi mana saja. Pemikiran politik yang hadir dalam sebuah masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi akhir masyarakat tersebut dalam mencari dan membentuk sistem politik yang dianggap ideal sebagai mekanisme untuk mengatur tata cara atau pola kehidupan dalam masyarakat sebagaimana yang didambakan. Pemikiran politik tersebut dapat berupa ide kritis, konservatif dan utopsi.³⁵

Pemikiran politik yang mencoba memikirkan bentuk sistem politik yang akan diterapkan di Indonesia bila diurut berdasarkan waktu telah muncul dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia itu lahir, yaitu sekitar awal abad ke duapuluh, termaksud didalamnya pemikiran Politik Islam, bahkan yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pemikiran politik Islam. Kemunculan pemikiran politik Islam ini kemudian disusul oleh pemikiran politik lainnya seperti nasionalis sekuler dan komunis³⁶.

Sebagai sebuah bagian dari ilmu politik, pemikiran politik, telah menempatkan posisinya yang penting dan mendasar dalam menentukan corak bentuk ilmu politik yang berlaku di suatu tempat, begitu dalam penerapannya.

³⁵Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan NegaraI* (Jakarta: Jurnal Transnasional, 2012), 6.

³⁶Irwan Iskandar, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan NegaraI* (Jakarta: Jurnal Transnasional, 2012), 1.

Pemikiran politik (*political thought*) dalam khazanah Bahasa Inggris diartikan dengan *political theory* yang hubungannya setidaknya ditemukan tiga kemungkinan:

- a. Pengertian teori lebih luas cakupannya dari pada pengertian pemikiran saja. Apabilah dalam pengertian teori itu kita masukan hal-hal yang tidak ada hubungannya pemikiran.
- b. Pemikiran politik lebih luas cakupannya dari pada teori. Apabilah kita berpendapat bahwa teori pada dasarnya tidak lebih hanya satu bentuk pemikiran.
- c. Ada bidang-bidang yang hanya dicakup oleh teori saja, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemikiran, dan sebaliknya mungkin pula ada-ada bidang-bidang yang hanya dicakup oleh pemikiran saja sehingga tidak berhubungan dengan teori.

2. Pemikiran Islam

Sebuah pemikiran tidak jarang sering dinisbatkan kepada orang yang menyebarkan dan mengadopsinya sehingga dinyatakan, misalnya, “Pemikiran Eropa” atau “Pemikiran Rusia”, kadang-kadang juga dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran itu sehingga sering dinyatakan pemikiran Marxis, pemikiran Plato, dan pemikiran Hegel.³⁷

Suatu pemikiran juga tiap kali disandarkan pada kaidah dasar (*al-qa'idah al-asasiyyah*) yang menjadi landasan pemikiran tersebut sehingga dinyatakan, misalnya, “*Pemikiran Islam*”. Disebut demikian karena kaidah dasar yang

³⁷Muhammad Husain Abdullah, *Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Jakarta: Jurnal 2010), 10.

membangun pemikiran tersebut adalah akidah Islam. Akidah Islam bukan berasal dari orang Arab atau manusia lainnya. Akidah Islam berasal dari Allah Swt. Allah Swt lah yang telah memberi nama dan ideologi (*Mabda'*) dan agama ini dengan nama *Islam*.³⁸ Allah Swt. Berfirman:

Artinya: sesungguhnya agama yang di ridhai di sisi Allah hanyalah Islam. (Q.S. Ali Imran [3]:19)

Pemikiran Islam, baik yang dinukil dari orang Arab atau dari selain orang Arab, tetap dipandang sebagai pemikiran Islam. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pemikiran yang dinukil dari Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Muhammad Asad An-Namsawi atau Abu A'la Al-Maududi. Semuanya merupakan pemikiran Islam. Meskipun terdapat keragaman ras atau bahasa pada individu-individu yang melakukan ijtihad atau yang menukilnya akan tetapi, pemikiran orang Arab sebelum datangnya Islam, bukanlah pemikiran Islam. Oleh karena itu "*Pemikiran Islam*" merupakan penyebutan sebuah pemikiran dengan sebuah sebutan yang sempurna, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Dengan demikian, semua pemikiran yang bersumber dari Islam, disebut dengan "*Pemikiran Islam*".³⁹

Sebuah defenisi yang benar harus memenuhi dua hal: "*menyeluruh*" (*Jamia''an*) sekaligus "*mencegah*" (*Mani'an*). Yang di maksud dengan menyeluruh (*Jamia''an*) yaitu mencakup seluruh bagian-bagian dan sifat-sifat dari sesuatu yang didefenisikan. Dan yang dimaksud dengan mencegah (*Mani'an*)

³⁸Ibid.10

³⁹Muhammad Husain Abdullah, *Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Jakarta: Jurnal 2010), 10.

yaitu mencegah masuknya Makna asing ke dalam sesuatu yang didefinisikan.

Dengan demikian, Pemikiran Islam mengandung tiga hal yaitu:

- a. Fakta (*al-waqi*).
- b. Hukum
- c. Berkaitan fakta dengan hukum.

Prinsip dasar dalam Islam yang mengatur dalam kehidupan publik yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Siyasah al-Dunya*) bertujuan untuk memaslahatkan masyarakatnya secara umum yang berkeadilan berdasarkan hukum etika sosial, maka dari itu kemudian Islam secara eksplisit manusia untuk mengajarkan manusia untuk menegakkan keadilan. Kebebasan toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta bermusyawarah dalam kehidupan bersama. Sedangkan disyariatkannya hukum secara substansif universal yaitu kemaslahatan manusia baik dunia maupun di akhirat kelak dengan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka serta memenuhi juga kebutuhan pelengkap bagi mereka.

Kemaslahatan itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:

- a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifz ad-Din*)
- b. Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-Nafs*)
- c. Hak memelihara keturunan (*hifz an-Nasl*)
- d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifz al-Mal*)
- e. Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-aql*)⁴⁰

⁴⁰Asy-syatibi, *al-Muawaffaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Dar al Fikr 1341 H), 11.

3. Tindakan Politik

Pada bagian ini peneliti lebih berkonsentrasi pada konsepsi Hannah Arendt tentang tindakan yang memiliki korelasi dengan intensi Politik. Arendt menekankan tindakan sebagai simbol utama karakter manusia dan jaringan relasi antar manusia yang disongkong oleh interaksi komunikatif, dua komponen utama teori tindakan politik Arendt adalah kebebasan dan pluralitas.⁴¹

Elemen-elemen yang termaktub dalam pluralitas adalah ruang publik dan privat, ucapan, penyingkapan, dan kekuasaan. Kedua elemen utama ini merupakan basis tindakan dalam kehidupan berkomunitas dan juga menjadi kekuatan dalam pola interaksi antara individu. Hannah Arendt berusaha membahasnya secara detail untuk meredam pengaruh totalitarianisme Hilter dan Nazi yang menyingkirkan kedua fitur tindakan ini.⁴²

- a. Kebebasan yang berawal dari fenomena natalitas, kebebasan merupakan komponen yang signifikan dalam kehidupan manusia. Kebebasan sangat membantu manusia dalam menghadapi realitas dunia modern yang penuh dengan berbagai persoalan. Arendt melihat bahwa kebebasan adalah kapasitas untuk memilih berbagai alternatif yang ditawarkan modernitas, kebebasan akan terpasung tatkala ada pemaksaan oleh pihak lain untuk memilih alternatif yang mungkin sesuai dengan intensi orang lain tersebut.⁴³

⁴¹ Jemali, M, *Eskalasi Tindakan Politik Dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt*, (Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio,2015), 20-31.

⁴² Ibid, 20-31.

⁴³ Ibid, 20-31.

- b. Pluralitas dapat menentukan kualitas penyingkapan melalui ucapan dan tindakan, penyingkapan para politisi, misalnya merupakan sesuatu yang signifikan karena pada saat itu disaksikan dan didengar oleh orang lain. Mereka dapat menunjukkan maksud dan tujuan aksi, visi, serta misi politiknya. Kondisi ini menjadi dasar dari kehidupan sebagai sesuatu yang khas dan unik diantara yang sama.⁴⁴

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini bisa dikatakan sebagai konsep dasar dalam proses penelitian nantinya. Sehingga konsep sangatlah begitu penting dalam sebuah penelitian. Dengan sebuah konsep penulis lebih bisa membatasi sehingga lebih mengarahkan pada topik yang sedang diteliti.

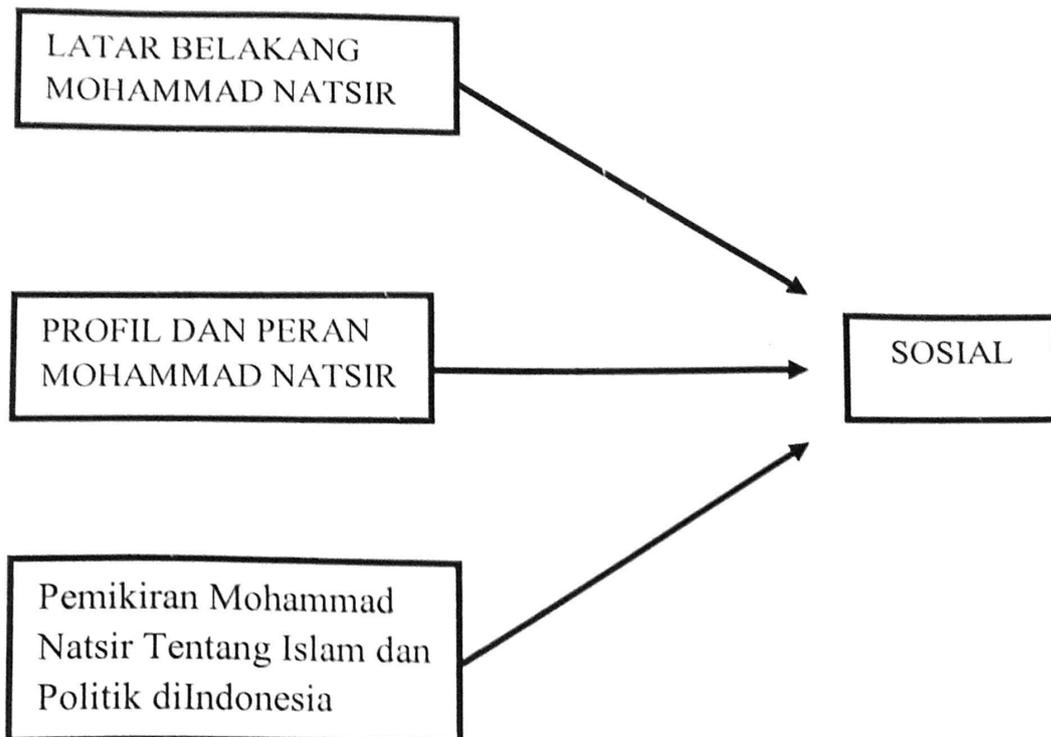
Dalam kerangka berpikir ini yang akan digunakan nantinya oleh penulis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menjelaskan tentang Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam Dan Politik di Indonesia.

Dalam penelitian ini agar lebih fokus dalam menjelaskan, sehingga hal yang menarik untuk diteliti berkenaan dengan Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Islam dan Politik di Indonesia.

Penelitian ini menyangkut masalah kisah yang terjadi pada masa lampau dan efek dari pemikiran Mohammad Natsir, dengan dimulai tahun 1945 saat Mohammad Natsir ditunjuk menjadi salah satu ketua Masyumi dan pada saat

⁴⁴ Jemali, M, *Eskalasi Tindakan Politik Dalam Perspektif Filosofis Hannah Arendt*, (Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio,2015), 20-31.

Indonesia telah menyatakan sebagai negara merdeka dan pemerintah Republik Indonesia terbentuk.



Gambar 1.1

Keterangan:

Kerangka bagan di atas terlihat bahwa penulis mengkaji seputar Pemikiran Mohammad Natsir sebagai tokoh Intelektual. Dan lebih terfokus kepada bagaimana proses terbentuknya Pengaruh Pemikiran Mohammad Natsir menjadi seorang tokoh Intelektual. Penjelasan akan dimulai dari Latar Belakang Mohammad Natsir bagaimana riwayat dan perjuangannya dalam perjalanan untuk sampai dan mencapai menjadi seorang tokoh Intelektual.

KIPRAH POLITIK MOHAMMAD NATSIR DI INDONESIA

A. *Kiprah Politik Mohammad Natsir Pra Kemerdekaan dan Pra Nasakom*

M. Natsir dalam pentas historis, namanya telah mengukir sejarah kebangkitan dan kemerdekaan tanah air Indonesia, ia pun telah meninggalkan goresan indah dikecerahan dunia Islam. Oleh sebab itu wajar kalau sosok M. Natsir tidak saja dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat dunia Islam. Hal ini dapat dicermati dari kiprah dan pengabdianya dalam perjalanan hidupnya penuh dengan keterlibatannya dalam berbagai gerakan, baik bersifat sosial, politik, maupun keagamaan.

Khusus dalam bidang politik keagamaan Natsir sudah mulai aktif sejak masa remaja. Keberhasilan politiknya ditandai dengan terpilihnya Natsir menjadi Ketua umum Partai Besar Masyumi (1949 - 1958), Menteri Penerangan RI sebanyak 3 kali (1946-1949) dan puncaknya menjadi perdana Menteri RI (1950-1951)

Dalam gerakan keagamaan Natsir juga tercatat prestasi yang luar biasa. Pada tingkat nasional. Beliau memegang pelbagai jabatan penting dalam organisasi-organisasi keagamaan. Beliau juga pendiri dan sekaligus Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta sejak tahun 1967 hingga akhir hayatnya. Sementara pada tingkat internasional beliau pernah memegang jabatan sebagai Wakil Presiden Mukhtar Ham Islam sejak tahun 1967 yang bermarkas di Karachi, Pakistan, Anggota Majelis

Rabithah Alam Al-Islami (Muslim World League) yang berkedudukan di Mekkah sejak tahun 1969 dan anggota Dewan Masjid sedunia (Majlis A'la Al Alami Bil Masjid) sejak tahun 1979, yang juga berpusat di Mekkah.

Untuk melihat kiprah Natsir secara kronologis, dalam hal ini dapat dibagi kepada beberapa periode antara lain:

- a. Periode sebelum kemerdekaan (sebelum tahun 1942), pada masa ini adalah kekuasaan pemerintahan di bawah kekuasaan pemerintah Belanda.
- b. Periode Pemerintahan Jepang (1942-1945) dimana pada tahun 1942 adalah tahun pergantian penguasa di Indonesia, dari tangan Belanda ke tangan Jepang, dan sejak tanggal 8 maret 1942 berakhirilah sejarah penjajahan Belanda atas Indonesia yang telah berlangsung selama 350 tahun.
- c. Periode masa orde lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966), mulainya untuk pertama kali Pemerintah Republik Indonesia berkuasa karena pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkannya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ir soekarno sebagai Presiden RI yang pertama dan Moh Hatta sebagai wakilnya.
- d. Periode masa orde Baru (Maret 1966). Pada tahun ini adalah peralihan kekuasaan pemerintahan yakni pemerintahan soekarno (orde lama) diserahkan kepada Soharto (orde baru).

1. Kiprah Politik Mohammad Natsir Pra Kemerdekaan (sebelum tahun 1912)

Kiprah M. Natsir di masa sebelum kemerdekaan, dimulai sejak ia masih duduk di sekolah MULO Padang dengan masuknya ia dalam organisasi pemuda Jong Islamiten Bond (JIB) yang pada waktu itu diketuai oleh Sanusi Pane, salah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal, selain JIB beliau masuk anggota Kepanduan Natipij (Nasional Islamidische Padvindj).⁴⁵ Dalam organisasi ini, ia sempat menjadi pengurus dan bahkan diangkat menjadi ketua JIB Cabang Bandung dan anggota Kern Lichan (Badan Inti) selama tahun 1928-1932. Disamping aktif dalam organisasi politik Natsir mengajar di salah satu MULO di Bandung. Karena ia tidak menerima tawaran untuk ke sekolah tinggi. Kenyataan ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajarkan agama. Beliau lalu mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (PENDIS), suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren tahun 1932-1942. Sekolah tersebut awalnya hanya diikuti oleh beberapa orang saja, tetapi dalam jangka 10 tahun sekolah itu berkembang pesat dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat TK (Frobel School)
- b. HIS (Holands Inlandshe School) sekarang tingkat SD, tapi lama belajarnya 7 tahun (MULO) SNIP, dan

⁴⁵ M. Munzir Adi Saputro, *Peranan Umat Islam di Zaman Jepang*, (Jakarta: Dewan Dakwah, 1979), 16-23.

c. Kweekschool (sekolah guru).⁴⁶

Tetapi sekolah ini harus ditutup bersama-sama dengan sekolah partikelir lainnya pada masa pemerintahan Jepang 1942.

Selama keterlibatannya dalam gerakan politik, iapun terlibat dalam politik keagamaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengabdikan dirinya dalam majalah Persatuan Islam (Persis) dan Komite Pembela Islam yang menerbitkan majalah tersebut. Karangan-karangan Natsir yang dipublikasikan oleh majalah tersebut yang ada pada waktu itu lebih sering memakai nama inisial "IS". Antara lain, *Mohammad as Prophet* (Muhammad sebagai Rosul 1931), *Qur'an en Evange lie* (Perbandingan antara Al-Qur'an dengan ajaran Nabi Isa As, 1931), *Gouden Regels Nit Al-Qur'an* (kalimah-kalimah emas dari Qur'an, 1932) *De Islamities Che Drone Haar Recht* (Hak-hak seorang wanita Islam 1934), *Net Islamidische Geloof* (Imam), dan *Komt tot Ket Gebed* (Marilah Shalat). Semua karangan Natsir dalam majalah ini ditulis dalam bahasa Belanda dan semuanya bernadakan dakwah Islam untuk masyarakat, khususnya umat Islam karena dia melihat kenyataan dalam masyarakat muslim banyak yang meninggalkan ajaran Islam.⁴⁷

Pada tahun 1938 Natsir mulai aktif dibidang politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) Cabang Bandung, M.Natsir menjabat sebagai Kepala Pendidikan Kodya Bandung sampai tahun 1945 dan merangkap sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.

⁴⁶ Ajib Rosidi, *M. Natsir sebuah Biografi*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), 145.

⁴⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991), 100.

2. Periode Pemerintahan Jepang (1942-1945)

Periode pendudukan Jepang merupakan episode sejarah hidup Natsir yang amat penting, karena membuka keterlibatannya dalam dunia politik secara langsung. Sehari setelah penyerahan Pemerintahan Belanda kepada Jepang, Pemerintahan Jepang mengharamkan semua organisasi dan rapat-rapat pada tanggal 20 November 1942 semua kegiatan politik termasuk rapat-rapat untuk membicarakan organisasi dan struktur pemerintahan di larang. Mulanya, pusat himpunan kekuatan politik di usahakan oleh pergerakan, "Tiga A" yaitu aksi propaganda anti sekutu yang diumumkan oleh Rymsui Buco (Gubernur Vilibier) di Jakarta pada tanggal 29 April 1942. Pergerakan itu di pimpin oleh Lk. R Syamsudin, tetapi pergerakan ini tidak mendapat sambutan dari rakyat Pihak Jepang sendiri melihat Soekarno, M. Hatta, Ki. Hajar Dewantara dan KH. Mansur sebagai tokoh-tokoh yang dapat menghimpun kekuatan Rakyat Indonesia di Jawa. Empat serangkai ini kemudian oleh pihak Jepang di jadikan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan Rakyat terhadap usaha-usaha peperangan terutama dalam perang positif.⁴⁸

Pada masa pemerintahan Jepang ini ada perbedaan yang menyolok dengan pemerintahan Belanda, kalau pada masa pemerintahan, Belanda, pihak Belanda tidak banyak menaruh perhatian kepada gerakan dan perkembangan umat Islam. Sedangkan pada pemerintahan pendudukan Jepang sangat banyak menaruh perhatian kepada gerakan dan perkembangan umat Islam. Dan tampaknya mereka mendorong dan memberi prioritas kepada kalangan Islam dalam

⁴⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1978), 22.

mendirikan organisasi mereka sendiri, sedangkan organisasi kalangan nasional yang netral agama tidak digalakkan.³⁸ Hal ini dapat di ketahui banyaknya organisasi Islam yang diakui dan tetap diolah dan dibolehkan organisasi nasional, sekalipun diakui tapi dibatasi gerakannya. Organisasi Masyumi sendiri, yang mulanya bernama MIAI (Majelis Islam Al Indonesia) yang didirikan pada tanggal 5 September 1942 di Jakarta yang kemudian organisasi ini diubah namanya menjadi "Majelis Syura Muslimin Indonesia" (Masyumi). Mula-mula dianggap oleh Jepang tempat bertemu atau forum yang di jadikan tempat berbicara dengan umat Islam. Di Masyumi ini M.Natsir sendiri termasuk salah seorang pengurusnya dengan Ki Haji Wahid Masyumi berasal dari NU.

Di masa pendudukan Jepang (1942-1945), selain dia aktif di Masyumi, diapun menjadi kepala bagian pendidikan Kotamadya Bandung (1942-1945), merangkap sebagai sekretaris sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta, cikal bakal IAIN sekarang ini, dengan pimpinannya M. Hatta dengan jabatannya sebagai sekretaris itu, diapun sering pulang pergi ke Bandung, Jakarta. Sehingga peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta ia tidak tahu sama sekali karena berada di Bandung.

3. Periode pada masa Orde Baru (5 Juli 1954 -11 Maret 1966)

Dimasa awal kemerdekaan Indonesia, M. Natsir tampil menjadi salah seorang politikus dan pemimpin negara. Pada awalnya ia menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNP) pada tanggal 25 November 1945 bersama sama dengan Dr.Sarwono dan Sudarsono dengan beranggota 25 orang membentuk parlemen sementara Republik Indonesia berkedudukan mewakili

rakyat untuk menyelamatkan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Setelah terbentuknya parlemen Sementara Republik Indonesia beliau pun ditunjuk untuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia yang pertama pada tanggal 3 Januari 1966. Jabatan ini di pegangnya sebanyak tiga kali mulai tahun 1946-1949. Pertama pada kabinet Syahrir I, II dan ketiga kalinya pada masa kabinet Muhammad Hatta.

Ketika negara ini terpaksa harus melepaskan bentuk kesatuannya menjadi negara federasi, terdiri dari beberapa negara bagian Natsir lah yang maju kedepan mengembalikan Republik Indonesia ke negara kesatuan melalui "Mosi Integralnya tanggal 3 april 1950. Karena jasanya memulihkan negara Kesatuan RI, tak lama kemudian Natsir pun diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri (1950-1951). Pelantikannya sebagai Perdana Menteri adalah konsekuensi yang wajar dari kedudukannya sebagai Ketua Partai Masyumi, Partai Politik terbesar di Indonesia di masa itu dia menduduki sebagai Ketua Umum Masyumi (1949-1958).⁴⁹

Dengan adanya struktur negara yang baru itu dengan sendirinya, Kabinet RIS bubar dan harus diganti dengan kabinet baru. Melihat keberhasilan yang ada pada diri Natsir, kemudian Presiden Soekarno mempercayakan kepadanya untuk memegang kabinet baru. Tak lama kemudian diangkat Natsir sebagai formatur kabinet pada tanggal 6 September 1950, dengan tanpa dukungan PNI (Partai Nasional Indonesia). Keberhasilan kabinet Natsir diantaranya adalah berhasil memadamkan pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang dipimpin

⁴⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Islam dan Demokrasi Politik M. Natsir*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), 121.

oleh Ir Manusama di Maluku Selatan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 1953 dan lain sebagainya. Tetapi tak lama kemudian kabinet Natsir jatuh pada tanggal 26 April 1951 di parlemen disebabkan adanya masalah Irian Barat yang belum tuntas penyelesaiannya untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Selain itu adanya kekecewaan Natsir kepada Soekarno yang mengasingkannya akibat penegasannya bahwa posisi Soekarno secara konstitusi sebagai Presiden tidak mengizinkan keterlibatannya dalam persoalan-persoalan kebijaksanaan negara.⁵⁰

Ketika konstituente dibubarkan" Natsir sudah tidak berada ditengah para anggota Majelis, karena situasi yang makin panas dan mengancam keselamatan pribadinya sejak akhir 1957, Natsir sudah hijrah ke Sumatera. Bersamaan dengan itu, ketidak puasan daerah terhadap Pemerintah Pusat sedang menuju ketitik klimaks. Tanggal 7-8 September 1957 sejumlah perwira militer berkumpul di Palembang dan melahirkan sebuah piagam yang antara lain menuntut dipulihkannya dwi-tunggal Soekarno-Hatta, diberlakukannya desentralisasi dan dilarangnya ajaran komunis.

Oposisi ini akhirnya merebak menjadi pergolakan bersenjata, setelah mereka membentuk PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Barat, hasilnya antara lain tentang Pemerintahan RI dibawah Pimpinan Perdana Menteri Djuanda adalah Pemerintahan yang tidak sah karena dibentuk Pemerintahan yang tidak sah karena dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan

⁵⁰ George Ue Turman Kahir, *Muhammad Natsir (1908-1993), Sebuah Kenang-kenangan*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), 61-62.

cara-cara yang menyimpang dari aturan-aturan konstituante. Keterlibatan M, Natsir dalam PRRI memang cukup kontroversial. Hal ini terlihat bagaimana isi ungapannya yang mengatakan bahwa Soekarno sudah melanggar UUD, kami mengajukan usul agar di buat kabinet yang di pimpin oleh Hatta sebagai Perdana Menteri dan Hamengkubuwono sebagai Wakilnya. Kabinet yang sekarang perlu menyerahkan mandat kepada Presiden, lalu dibuat Kabinet baru, Presiden tetap Presiden, jadi kami ingin kembali ke UUD dan yang penting bagaimana menyatukan negara kembali.

Akhirnya PRRI dapat dilumpuhkan secara militer oleh Pemerintah Pusat, sehingga keberadaan mereka tercerai berai. PRRI yang kemudian berganti nama menjadi Republik Persatuan Indonesia (RPI) akhirnya menghentikan perlawanan setelah pemerintah pusat mengumumkan amnesti umum kepada mereka yang menyerah. Setelah menerima amnesti dari keterlibatannya dalam PRRI, Natsir ternyata ditahan oleh Pemerintah Pusat dengan dakwaan "subversif". Hal ini sebenarnya tidak sejalan dengan janji amnesti yang sebelumnya telah diumumkan. Selama 7 tahun ia berada dalam tahanan tanpa proses peradilan sehingga kesalahannya secara hukum tidak pernah dibuktikan. Dan Natsir baru dibebaskan oleh Pemerintah Orde Baru, beberapa waktu setelah pemerintah Presiden Soekarno jatuh.

4. Periode Masa Orde Baru (11 Maret 1966)

Pada masa orde lama di bawah pimpinan Soekarno yang berkolaborasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), bersama tokoh-tokoh nasional anti komunis lainnya beliau meringkuk dalam tahanan sampai akhirnya dikeluarkan

pada tahun 1966. Tatkala pemerintah orde baru muncul, M.Natsir mendapat tempat dalam kedudukan di pemerintah orde baru. Natsir tampaknya tidak diajak oleh pemerintah orde baru untuk bersama untuk memimpin negara yang baru saja terbentuk, padahal kalau dilihat dari segi kredibilitas dan kemampuannya sebagai seorang birokrat/negarawan sebenarnya tidak diragukan lagi. Apakah pemerintahan orde baru mencurigainya ketika pada masa orde lama dengan gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia, atautkah apa yang dilakukan itu dianggap sebagai suatu cacat politik masuk dalam daftar hitam. Hanya Tuhanlah yang maha tahu.

Dalam bidang kenegaraan dan dunia politik sebagai mana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa M.Natsir menyumbangkan baik pemikiran atau tenaganya untuk Indonesia yang telah merdeka itu adalah dimulainya M.Natsir menjadi anggota Komite Nasional Pusat (KNIP) Tatkala Sutan Syahrir memerlukan dukungan Islam untuk kabinetnya, beliau meminta M.Natsir menjadi Menteri Penerangan. Bung Karno yang pernah menjadi lawan politik M.Natsir pada tahun 1930 an, sama sekali tidak keberatan atas gagasan Syahrir menunjuk M Natsir menjadi Menteri Penerangan "Hij de man (dialah orangnya) " kata Bung Karno. Bekas wakil Presiden M. Hatta, memberi kesaksian bahwa Bung Kamo tidak mau menandatangani suatu keterangan pemerintah, jika bukan M. Natsir yang menyusunnya.

Ketika negara Republik Indonesia "terpaksa" harus melepas bentuk kesatuannya menjadi negara federasi M. Natsir maju kedepan mengembalikan Republik Indonesia ke negara kesatuan melalui mosi integral, 3 april 1950.

Tentang hal ini Moh Roem mencatat betapa dalam ikhtiar melicinkan jalan bagi mosi integral itu, beliau berbicara dengan pemimpin fraksi paling kiri Ir.Sakir mandat PKI, dan dengan pemimpin Fraksi paling kanan Sahetapy Engel dari BFO. Ketika menyampaikan usul mosi integral di parlemen, beliau menahan diri untuk tidak berbicara soal federalisme atau unitarisme. Menurutnya persoalan pokok bukan disisihkan. Setelah "mosi integral" berhasil, M. Natsir dipercayai menjadi Perdana Menteri tapi beliau tidak memikirkan hal itu, karena beliau merasa heran wartawan harian Merdeka itu gigih bertanya kepada Soekarno tentang siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, kata Soekarno, yang siapa lagi kalau bukan M. Natsir dari Masyumi, mereka punya konsepsi untuk menyelamatkan Republik ini melalui konstituante.⁵¹

M. Natsir dilantik menjadi Perdana Menteri pada tanggal 7 September 1950 yang didukung oleh sebelas partai sedang PNI dan PKI beroposisi. Ketika beliau menjadi Perdana Menteri situasi sangat tidak menentu, karena gejolak revolusi dan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dengan dibubarkan RIS. Tugas utama yang dihadapinya adalah menyelamatkan Indonesia dari "lubang jarum" revolusi, dan membenaran ekonomi rakyat yang terbengkalai. Beliau membuat kebijakan terpuji yang dikenal dengan "*Program Benteng*", untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekonomi asing. Program utamanya adalah menyelenggarakan pemilu secepatnya. Meski program itu tidak terlaksana, karena kabinetnya jatuh satu tahun berikutnya. berhasil menyesuaikan bibit demokrasi dalam mengatasi berbagai gejolak. Dalam kaitan ini prestasinya

⁵¹ M. Natsir, *Politik Melalui Jalur Dakwah*, (Jakarta: PT. Abadi, 1998), 13.

terletak pada peran dalam pemberian arah konstitusional negara kesatuan dengan tetap memegang prinsip-prinsip dialog integral antara pusat dan daerah. Pada saat bersamaan, langkahnya itu dibarengi sikap berusaha sekecil mungkin menempuh jalan kemiliteran.

Dalam masa kabinetnya banyak timbul gejolak-gejolak seperti persoalan Republik Maluku Selatan (RMS), tuntutan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureueh untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia, yang bergejolak sejak awal 1950 dan menyita banyak perhatiannya. Semua gejolak tersebut dapat diatasi berkat diplomasi pemerintahan M.Natsir walaupun sebelumnya beberapa kali mengalami kegagalan. Persoalan Aceh juga dapat diatasi berkaiatan dengan pertemuan Natsir-Daud Beureueh pada tanggal 23 Januari 1951. Keduanya sepakat bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan mendengarkan aspirasi rakyat Aceh dengan memberi otonomi daerah.

Dalam seluruh sepek terjang politiknya, M.Natsir selalu menunjukkan watak sebagai seorang demokrat sejati. Beliau senantiasa berteguh hati (istiqomah), memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, namun tidak bertindak di luar konstitusi, apalagi melawan hukum. Menurut beliau politik harus dilandasi iktikat baik, kejujuran, etika dan akhlak. Menurut beliau, seorang demokrat sejati harus menghormati pendirian dan pendapat orang lain, betapapun ia tidak setuju bahkan menentangnya.⁵²

Tindakannya yang lain yaitu menformalisasikan hubungan dengan Malaysia, memperlancar hubungan dengan Saudi Arabia, meyakinkan Pemerintah

⁵² M. Natsir, *Politik Melalui Jalur Dakwah*, (Jakarta: PT. Abadi, 1998), 46.

Jepang, tentang perlu memberi bantuan ekonomi kepada pemerintah orde baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto "memprovokasi" pemerintah Kuwait mau menanamkan modalnya di Indonesia, memperbesar dukungan dunia Islam terhadap kebijakan Indonesia di Timor-timor dan lain sebagainya. Hal tersebut di atas memang tidak diketahui masyarakat umum dan saya kira memang tidak ada perlunya diketahui umum.

Setelah mengalami liku-liku perjuangan di dunia politik dengan suka dukanya dalam roda perjuangannya tersebut, Mohammad Natsir lebih banyak berjuang dalam sosial, terlebih lagi setelah pemerintah orde baru menutup kesempatan bagi tokoh-tokoh mantan Masyumi untuk berbakti kepada negara di bidang politik. Beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya yang bercita-cita dan sejalan dengan mendirikan wadah baru berbentuk yayasan yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta, dan beliau menjadi ketua umumnya sampai wafat. Dewan Dakwah membentuk perwakilan di daerah dan secara pro aktif mengembangkan dakwah di lapangan dalam dimensi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di bidang spiritual, kultural ataupun material.

Di lembaga Dewan Dakwah Islamiyah ini M. Natsir berkiprah untuk kepentingan Ummat dan masyarakat Indonesia yakni meliputi :

1. Mengadakan penerbitan islami seperti majalah seri Al-Media Dakwah, Majalah anak-anak, sahabat, penerbit Buku media Dakwah, suara Masjid, serial Khotbah Jum'at dan lain-lainnya.

2. Ahli mengirimkan para dai (Juru dakwah) dengan guru agama ke berbagai daerah pedalaman dan lokasi transmigrasi di Indonesia.
3. Membantu pembangunan masjid (di daerah pedalaman) dan transmigrasi juga mendorong pembangunan Masjid di lokasi Industri dan Masjid kampus, rumah sakit Islam, madrasah, sekolah, dan lain-lain.
4. Menggalang dakwah Islamiyah (rasa persaudaraan berdasarkan ikatan agama Islam) misalnya mendirikan forum ukhuwah Islamiyah (FUI) mendorong berdirinya BKSPP (Badan Kerja sama pondok pesantren) untuk menjalin silaturahmi antar pesantren se Indonesia.
5. Memberikan kritik yang membangun kepada rezim Soekarno misalnya dengan meminta pemerintah agar menghapus PORKASI, Sumbangan Dermawan Sosial Berkadiah (SDSB). Membebaskan putri-putri di sekolah negeri agar di izinkan memakai pakaian jilbab.

Tahun 1980 M. Natsir menerima penghargaan Award dari Kerajaan Saudi Arabia atas pengabdianya yang luar biasa kepada dunia Islam, beliau juga merupakan anggota Dewan pendiri The Oxford Centre For Islamic Studies, di London, Inggris, dan anggota dewan pendiri the Internasional Islamic Cliari Table Foundation, Kuwait.

M. Natsir dalam membina dakwah melalui pemikiran, tulisan dan tindakan nyata, untuk membentengi umat Islam namun bukan berarti surut sama sekali perhatiannya terhadap perkembangan aktual kehidupan nasional. Beliau bekerjasama rekan-rekannya di Dewan Dakwah terhadap berbagai isu sentral yang

bersinggungan dengan kepentingan umat Islam, dan selalu mengambil sikap sebagai seorang pembawa nurani umat. Misalnya pada waktu munculnya instruksi RUU Perkawinan tahun 1973, soal aliran kepercayaan, materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) Azas tunggal pancasila SDSB dan lain-lain.

B. Kiprah Politik Mohammad Natsir Pasca Kemerdekaan

Sejarah perjuangan dan perjalanan politik Indonesia melahirkan sejumlah tokoh, yang memiliki reputasi, kharisma dan keteladanan yang melegenda. Diantara tokoh-tokoh tersebut misalnya Soekarno, Mohammad Hatta, H. Agus Salim, Cokroaminoto, dan sebagainya, termasuk Mohammad Natsir.⁵³ Mohammad Natsir adalah tokoh pemikir dan pejuang yang menyelamatkan negeri ini dari perpecahan.

Mohammad Natsir tak pernah berhenti berpikir dan berjuang untuk ummatnya, bahkan saat menjelang ajal menjemputnya, ia terus berpikir dan berjuang untuk ummatnya yang sangat dicintainya. Mohammad Natsir bukan hanya seorang penulis dan aktifis, lebih dari pada itu Mohammad Natsir adalah seorang tokoh intelektual sekaligus ulama yang kharismatik, guru yang hebat, pemikir bangsa yang cerdas dan sebagai jurnalistik yang kritis.⁵⁴

Mohammad Natsir diakui sebagai tokoh handal sebagai Pemikir, Intelektual, Pujangga, dan Negarawan. Ia tidak hanya terampil menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun ia bertindak secara nyata. Buktinya,

⁵³ FURKON, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun* (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 98.

⁵⁴ Yuzril Ihza Mahendra, *M. Natsir Tokoh yang Konsisten dengan Perjuangan*, (Jakarta: Deefublish, 2020), 7.

selain pernah mengetuai Jong Islamiten Bond (JIB) di Bandung, tahun 1928-1932.⁵⁵

Mohammad Natsir pernah pula aktif di Partai Islam Indonesia (PII) dan PERSIS. Di dunia pendidikan, Mohammad Natsir sempat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung, sebuah bentuk pendidikan Islam modern yang bernafas agama. Di Persis ini Mohammad Natsir menjadi direktur selama 10 tahun sejak 1932.⁵⁶

Mohammad Natsir pernah pula menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung, 1940-1942. Ia pernah aktif sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) 1945-1946.⁵⁷ Kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan tiga periode pada era Kabinet Sahrir dan Hatta sejak 1946-1949.

Kemudian menjadi Ketua DPP Masyumi 1949-1958. Pada saat Indonesia menjadi negara Serikat (RIS), sebagai produk Konferensi Meja Bundar (KMB). Mohammad Natsir menolak tawaran Bung Hatta menjadi PM negara bagian RI di Jogja.⁵⁸ Namun Mohammad Natsir tetap melakukan lobby selama dua setengah bulan menghubungi negara bagian lainnya, agar membubarkan diri dan bersatu kembali dengan negara kesatuan RI di bawah pimpinan Soekarno-Hatta.

Keterlibatan di organisasi dan terutama di politik memberikan dilema tersendiri bagi Mohammad Natsir karena harus meninggalkan Pendidikan Islam

⁵⁵ Ajip Rosidi, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Baru Indonesia*, (Bandung: Jurnal Mizan. 2010), 6.

⁵⁶ Anwar Harjono, *Pengantar Dalam Abibullah Djaini Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996), 9.

⁵⁷ Furkon, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun 1945-1958*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 22.

⁵⁸ *Ibid*, 22.

yang didirikannya namun, di sini ketenangan dan kematangan Mohammad Natsir menentukan pilihan dibuktikan.

Mohammad Natsir melontarkan mosi yang memungkinkan RI bersatu kembali, Mosi ini sangat populer dan dikenal dengan nama "Mosi Integral Mohammad Natsir". Atas jasanya ini, Soekarno mengangkat Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri.⁵⁹ Mohammad Natsir merupakan Perdana Menteri Pertama RI. Ini adalah jenjang karir politik Mohammad Natsir tertinggi sepanjang hidupnya. Meski bukan akhir pengabdianya pada bangsa dan negara.

Konsistensi Mohammad Natsir telah menjadikannya sebagai tokoh yang paling kompleks di antara para tokoh nasional Indonesia, untuk itulah karya tentang beliau tidak pernah tuntas.⁶⁰ Ketika Mohammad Natsir tidak lagi menjadi seorang politikus dalam pengertian orang partai, beliau mengambil jalan dakwah sebagai jalan untuk melanjutkan perjuangannya, namun dengan sikap pejuang yang di miliki Mohammad Natsir dalam arti bahwa berjuang tidak ada akhirnya.

Bukti perjuangan Mohammad Natsir dalam Dakwah, Politik serta mengenyam Pendidikan sampai di sekolah Belanda Algemeene Middelbare School (AMS) membuatnya melek terhadap dampak buruk penjajahan di Indonesia. dimana Dampaknya Mohammad Natsir berhasil mengambil hati jutaan rakyat Indonesia dan menyelamatkan negara dari ambang perpecahan.⁶¹

Sejak Orde Baru tidak adalagi pejuang, namun yang ada hanyalah penikmat penikmat kemerdekaan. Tidak ada lagi pejuang-pejuang kemerdekaan,

⁵⁹ FURKON, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun 1945-1958*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 23.

⁶⁰ Ibid, 23.

⁶¹ Ibid, 23.

dan itulah makna dari kemerosotan akhlak dan etika. Sebagian instansi pemerintah, masih penuh dengan koruptor karena di sana tidak ada etika. Itulah sebenarnya yang mau di bangun oleh Mohammad Natsir lewat dakwah dan kaitannya dengan etika politik.⁶²

C. Peran dan Kiprah Mohammad Natsir Pasca Nasakom

Pada tahun 1958 dengan adanya peristiwa ketika Mohammad Natsir mengkritik keras gagasan nasakom (Nasionalis, Agama Komunis) yang diprakarsai Presiden Soekarno saat mengumumkan dekrit 5 Juli 1959 dan kemudian membubarkan DPR hasil pemilu 1955, Mohammad Natsir mengejam kebijakan ini dan sebagai seorang diktator.⁶³

Peranan Mohammad Natsir yang mewakili Islam, berusaha menentang arus sekularisme yang dihembuskan nasionalisme sekuler yang diwakili Ir. Soekarno. Melalui kumpulan tulisannya yang berjudul Persatuan Agama dan Negara Mohammad Natsir menyangkal argumentasi Ir. Soekarno yang dimuat dalam artikel Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Negara.⁶⁴

Dengan dipublikasikannya Persatuan Agama dan Negara tersebut Mohammad Natsir memulai perjuangannya untuk memperkenalkan pemikiran politiknya dalam menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perpolitikan Indonesia.⁶⁵

⁶² Anhar, *Tragedi di Tengah Krisis Transisional, Dalam Lukman M. Natsir di Panggung Sejarah Republik. Panitia Peringatan Refleksi Seabad M. Natsir*. (Jakarta: Jurnal Anhar, 2008), 25.

⁶³ FURKON, *Peranan Mohammad Natsir Sebagai Tokoh Intelektual Pada Tahun 1945-1958*, (Bandung: Universitas Siliwangi, 2022), 23.

⁶⁴ Ibid, 24.

⁶⁵ Irwan, *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara. Jurnal Transnasional*, (Bandung: Jurnal Internasional, 2015), 1756.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Mohammad Natsir

Mohammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia, sedangkan dikancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim Dunia (*World Muslim League*) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia.⁶⁶

Natsir lahir dan dibesarkan di Solo, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno, ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia. Natsir kemudian terlibat pemberontakan PRRI, yang membuatnya sempat dipenjara. Setelah dibebaskan

⁶⁶ Hakiem Lukman, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 978.

pada tahun 1966, Natsir terus mengkritisi pemerintah yang saat itu telah dipimpin Soeharto hingga membuatnya dicekal.⁶⁷

Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929 hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi tiga gelar doktor honoris causa, satu dari Lebanon dan dua dari Malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Natsir dikenal sebagai menteri yang "tak punya baju bagus, jasanya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah."⁶⁸

Mohammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sutan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh pemiliknya, rumah itu dibelah menjadi kedua bagian: pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri dan Mohammad Idris Sutan Saripado tinggal di sebelah kanannya. Ia memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai pegawai pemerintahan di Alahan Panjang, sedangkan

⁶⁷ Hakiem Lukman, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 978.

⁶⁸ *Ibid*, 978.

kakeknya merupakan seorang ulama. Ia kelak menjadi pemangku adat untuk kaumnya yang berasal dari Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar *Datuk Sinaro nan Panjang*.

Natsir mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama dua tahun hingga kelas dua, kemudian pindah ke *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) Adabiyah di Padang. Setelah beberapa bulan, ia pindah lagi ke Solok dan dititipkan di rumah saudagar yang bernama Haji Musa.^[9] Selain belajar di HIS di Solok pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari. Tiga tahun kemudian, ia kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti *Pandu Nationale Islamietische Pavinderij* dan *Jong Islamieten Bond*. Setelah lulus dari MULO, ia pindah ke Bandung untuk belajar di *Algemeene Middelbare School* (AMS) hingga tamat pada tahun 1930. Dari tahun 1928 sampai 1932, ia menjadi ketua *Jong Islamieten Bond* (JIB) Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru selama dua tahun di perguruan tinggi. Ia yang telah mendapatkan pendidikan Islam di Sumatera Barat sebelumnya juga memperdalam ilmu agamanya di Bandung, termasuk dalam bidang tafsir Al-Qur'an, hukum Islam, dan dialektika. Kemudian pada tahun 1932, Natsir berguru pada Ahmad Hassan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam.⁶⁹

⁶⁹ Hakiem Lukman, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 979.

2. Karir Mohammad Natsir

Natsir banyak bergaul dengan pemuka-pemuka Islam, seperti Agus Salim selama pertengahan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia di masa depan yang dipimpin Soekarno. Pada tahun 1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Buro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi) dan diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga dibubarkannya Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.⁷⁰

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno, yang disebabkan karena

⁷⁰ M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. (Bandung: Mizan, 2010), 579

Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Soekarno selaku presiden sekaligus ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI) terus mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.⁷¹

Selama era demokrasi dipimpin di Indonesia, ia terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia setelah meninggalkan Pulau Jawa PRRI yang menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas disalahtafsirkan oleh Soekarno sebagai pemberontakan. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada tanggal 26 Juli 1966. Setelah dibebaskan dari penjara, Natsir kembali terlibat dalam organisasi-organisasi Islam, seperti Majelis Ta'sisi Rabitah Alam Islami dan Majelis Ala al-Alami lil Masjid yang berpusat di Mekkah, Pusat Studi Islam Oxford (*Oxford Centre for Islamic Studies*)

⁷¹ M. Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010), 579.

di Inggris, dan Liga Muslim se-Dunia (*World Muslim Congress*) di Karachi, Pakistan.⁷²

Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980, yang menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Pada masa-masa awal Orde Baru ini, ia berjasa mengirim nota kepada Tunku Abdul Rahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia. Selain itu pula, dialah yang mengontak pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi. Soeharto menganggap orang yang mengkritik dirinya sebagai penentang Pancasila. Ia ikut menandatangani Petisi tersebut bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Hardjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain. Akibat dilarangnya ia pergi ke luar negeri, banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam dan mengkritik Opsus (Operasi Khusus) yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto. Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir dalam memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto.⁷³

3. Karya Mohammad Natsir

Selama menjalani pendidikannya di AMS, Natsir telah terlibat dalam dunia jurnalistik. Pada 1929, dua artikel yang ditulisnya dimuat dalam

⁷² M. Dzulfikridin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010), 579.

⁷³ *Ibid*, 580.

majalah *Algemeen Indische Dagblad*, yaitu berjudul *Qur'an en Evangelie* (Al-Quran dan Injil) dan *Muhammad als Profeet* (Muhammad sebagai Nabi). Kemudian, ia bersama tokoh Islam lainnya mendirikan surat kabar *Pembela Islam* yang terbit dari tahun 1929 sampai 1935. Ia juga banyak menulis tentang pandangannya terhadap agama di berbagai majalah Islam seperti *Pandji Islam*, *Pedoman Masyarakat*, dan *Al-Manar*. Menurutnya, Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia.⁷⁴

Adapun beberapa karyanya, Natsir telah menulis sekitar 45 buku atau monograf dan ratusan artikel yang memuat pandangannya tentang Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam sejak karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Karya terawalnya umumnya berbahasa Belanda dan Indonesia, yang banyak membahas tentang pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, dan peran perempuan dalam Islam. Karya-karya selanjutnya banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris, dan lebih terfokus pada politik, pemberitaan tentang Islam, dan hubungan antara umat Kristiani dengan Muslim. Ajip Rosidi dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah menyebutkan bahwa tulisan-tulisan Natsir telah menjadi catatan sejarah yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam. Selain menulis, Natsir juga mendirikan sekolah Pendidikan Islam pada tahun 1930 sekolah tersebut ditutup setelah pendudukan Jepang di Indonesia.⁷⁵

⁷⁴ Setiadi, Purwanto. "Sumatera Barat Sambut Gelar Pahlawan Nasional Natsir". *Majalah Tempo Interaktif*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 159.

⁷⁵ Setiadi, Purwanto. *Douwes Dekker: Sang Inspirator Revolusi. KPG* (Jakarta: Gramedia, 2012), 199.

Sekalipun Natsir memiliki latar belakang pendidikan Belanda, Natsir tidak tergerak sama sekali untuk melakukan westernisasi atau sekularisasi dalam dunia pendidikan Islam. Ia juga peduli akan pengaruh pendidikan Barat terhadap generasi muda. Sebenarnya, langkahnya ini yang peduli terhadap dunia pendidikan disebabkan setelah dia membaca karangan Snouck Hurgronje yang melawan Islam, seperti *Netherland ende Islam* yang memaparkan strategi Hurgronje dalam melawan Islam. Buku ini pada akhirnya kemudian membuat Natsir bertekad melawan Belanda lewat jalur pendidikan.

B. Pemikiran Politik Mohammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara

Muhammad Natsir, yang mewakili Islam, berusaha menentang arus sekularisme yang dihembuskan nasionalisme sekuler yang diwakili Ir. Soekarno. Melalui kumpulan tulisannya yang berjudul *Persatuan Agama dan Negara* Muhammad Natsir menyangkal argumentasi Ir. Soekarno yang dimuat dalam artikel *Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dengan Negara*. Dengan dipublikasikannya *Persatuan Agama dan Negara* tersebut Muhammad Natsir memulai perjuangannya untuk memperkenalkan pemikiran politiknya dalam menjadikan Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perpolitikan Indonesia. Dalam berbagai kesempatan dan media beliau tak putus-putusnya untuk memperkenalkan pemikiran politik Islamnya.

Muhammad Natsir merupakan salah seorang tokoh-tokoh pemimpin nasional yang berasal dari Minangkabau, disamping tokoh-tokoh pemimpin nasional lainnya yang berasal dari daerah yang sama seperti H. Agus Salim, Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Buya Hamka.

Selain dikenal sebagai seorang pemikir, Muhammad Natsir juga termasuk seorang negarawan, politisi dan da'i yang ulung. Dalam kehidupan politiknya bersama-sama dengan partai politik Masyumi, Muhammad Natsir berusaha mempertahankan dan menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut tampak dengan jelas dalam sidang-sidang Konstituante.

Polemik antara Muhammad Natsir dan Soekarno tentang hubungan agama dan negara memang cukup tajam. Disaat Soekarno menyatakan bahwa tidak ada ijma ulama yang menyatakan bahwa agama dan negara harus bersatu, maka Muhammad Natsir kemudian menjawab pernyataan tersebut dengan mengatakan "Mana pulakah ijma-ijma ulama yang mengatakan agama dan negara tidak harus bersatu?"⁷⁶ Dari pernyataan tersebut dapatlah dipahami bahwa Muhammad Natsir menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara.

Beliau mengutarakan bahwa agama membutuhkan negara sebagaimana dikutip di bawah ini:

Untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada suatu kekuatan dalam pergaulan hidup, berupa kekuasaan dalam negara.⁷⁷

Begitupun sebaliknya, Muhammad Natsir beranggapan bahwa negara membutuhkan Islam seperti dalam pernyataannya. Hanyalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. ialah beberapa patokan untuk mengatur negara, supaya

⁷⁶ M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, dalam (ed) Endang Saefuddin Anshari dan LIPPM.*(Jakarta: Media Dakwah, 2001), 81.

⁷⁷ M. Natsir. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, dalam (ed) Endang Saefuddin Anshari dan LIPPM.*(Jakarta: Media Dakwah, 2001), 78.

negara itu menjadi kuat dan subur, dan boleh menjadi wasilah yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang berhimpun dalam negara itu, untuk keselamatan diri dan masyarakat, untuk kesentosaan perseorangan dan kesentosaan umum.⁷⁸

Gagasan Muhammad Natsir tentang Islam dan negara banyak diungkapkan dalam tulisan-tulisan beliau pada majalah Pembela Islam dan Pandji Islam. Pengungkapan gagasan-gagasan yang dimuat dalam berbagai tulisan tersebut menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang intelektual dan pemikir. Sehingga, gagasan yang dihidirkannya ke dalam bentuk ilmiah tersebut dapat diuji kebenarannya dan dapat diterima oleh berbagai kalangan luas.

Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh beliau, baik secara formal yaitu ketika berada di HIS, MULO, dan AMS; maupun secara informal yang diperoleh beliau ketika belajar di JIB dan PERSIS telah membentuk pemikiran beliau. Apalagi, pemikiran ini didukung oleh kemampuan beliau dalam menguasai berbagai bahasa hingga memungkinkan beliau untuk dapat berinteraksi dan membaca karangan-karangan berbahasa asing, seperti dalam bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Arab, dan bahasa Prancis.

Muhammad Natsir adalah sosok yang lebih condong mewujudkan gagasannya tentang negara Islam melalui jalan legal konstitusional. Beliau lebih memilih cara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang tengah berlaku. Hal ini tentunya memudahkan beliau dalam menyampaikan pemikirannya dan menghindari pertentangan-pertentangan yang

⁷⁸ Ibid, 83.

serius dengan berbagai komponen bangsa lainnya. Walaupun sistem politik yang sedang dijalankan tidak bersifat aspiratif dengan pemikirannya, Muhammad Natsir lebih memilih masuk ke dalam sistem politik tersebut dan merubahnya dari dalam.

Bentuk nyata perwujudan gagasan melalui jalur legal konstitusional ini ditampakkan dengan perjuangan yang dilakukan Muhammad Natsir bersama-sama partai Masyumi. Masyumi bagi beliau merupakan sebuah kendaraan politik untuk turut berkecimpung dalam politik dan turut menentukan perjalanan bangsa. Dengan Masyumi beliau tergabung dengan lembaga yang berwenang mensyahkan UUD dan peraturan kenegaraan lainnya, yang oleh UUD yang berlaku waktu itu UUD Sementara dilimpahkan kedalam lembaga parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jabatan sebagai anggota partai tersebut diembannya dari tahun 1950 hingga tahun 1958.

Peran nyata Muhammad Natsir melalui jalur legal konstitusional ini kian nyata di saat ia kemudian terpilih masuk ke dalam lembaga Konstituante, yang menurut pasal 34 UUDS RI, bertugas bersama-sama pemerintah menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS ini. 16 Jabatan sebagai anggota Konstituante dipegang oleh beliau sejak dibentuknya lembaga ini pada tahun 1956 hingga akhirnya beliau keluar dari lembaga tersebut pada tahun 1958. Keterlibatan Muhammad Natsir dalam lembaga perwakilan tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk yang menjunjung demokrasi. Sebab, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dilakukan menurut jalur perwakilan yang timbul dari adanya perbedaan-perbedaan dalam warga negara. Badan perwakilan tersebut biasanya

disebut parlemen¹⁷ yang membentuk dan menyatakan kehendak (*volente generale*) dalam bentuk undang-undang, dimana pembentuk badan perwakilan tersebut sebagian besar terlaksana dengan usaha-usaha partai politik.⁷⁹

Muhammad Natsir tidak menyetujui bentuk perjuangan yang dilakukan tokoh Islam lainnya yang cenderung menggunakan kekerasan dan benturan, seperti S. M. Kartosuwiryo dengan NII (Negara Islam Indonesia)-nya dan Daud Beureueh dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)-nya. Walaupun sama-sama berkehendak untuk memajukan Islam ke dalam kehidupan perpolitikan, namun, Muhammad Natsir tidak setuju terhadap bentuk perjuangan yang menggunakan senjata yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut karena akan meminta banyak korban anak negeri. Walaupun harus terjadi sebuah revolusi dalam negara, namun bentuk revolusi yang diinginkan beliau haruslah revolusi tanpa darah. Ketidaksetujuan Muhammad Natsir terhadap perjuangan tokoh-tokoh Islam lain tersebut, selain karena perjuangan tersebut bersifat angkat senjata, juga karena perjuangan tokoh-tokoh tersebut berusaha untuk memisahkan diri dari negara kesatuan suatu hal yang pernah dipertahankan beliau. Dimana, melalui Mosi Integral, beliau memelopori pengembalian bentuk negara dari federalisme menjadi bentuk negara kesatuan.

C. Islam Sebagai Dasar Negara

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri yang mayoritas berpenduduk muslim pada awal pembentukannya adalah bagaimana

⁷⁹ Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, (Bandung dan Jakarta: PT. Eresco, 1978), 38.

mendudukan agama dalam kehidupan bernegara. Selain Indonesia, negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, maupun Asia Selatan juga mengalami problem yang sama. Hal ini terkait dengan respon dinamika terhadap arus nasionalisme dan demokrasi, semenjak abad 20. Selain itu yang menjadi faktor penting dalam kaitan ini adalah posisi Islam di dalam negara. Terjadinya simpang pemahaman umat Islam dalam persoalan inilah yang banyak melahirkan gesekan antara mereka dalam menentukan bagaimana cara menjadikan Islam sebagai dasar Negara⁸⁰

Menurut Natsir di dalam menyusun suatu undang-undang dasar bagi negara kita ini dan untuk mencapai hasil yang memuaskan, perlulah bertolak dari pokok pikiran yang pasti, yakni bahwa undang-undang dasar bagi negara harus menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang hidup di negara kita. Undang-undang dasar itu harus berurat berakar dalam kalbu, yakni berurat berakar dalam alam pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan serta falsafah hidup dari rakyat dalam negara tersebut.⁸¹

Ketika Natsir menginginkan Islam sebagai dasar Negara, golongan sekuler memberikan pertanyaan bagaimana mungkin Islam dapat mengatur negara modern seperti saat ini. Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk untuk merancang Anggaran Belanja Negara. Menurut Natsir itu semua

⁸⁰ Audrey R. Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir* (Singapore: NUS Press, 2012), hal. 1, lihat pula Abuddin Nata, *Tokohtokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 73-76.

⁸¹ Muhammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hal 21.

memang tidaklah ada dan memang tidak perlu diatur dengan wahyu *Ilahi* yang bersifat kekal, sebab hal-hal yang berkenaan dengan keduniaan selalu bertukar dan berubah menurut tempat, zaman dan keadaannya.

Islam hanya mengatur dasar dan pokok-pokok mengatur masyarakat manusia, yang tidak berubah-ubah kepentingan dan keperluannya selama manusia itu masih bersifat manusia. Islam ditetapkan untuk keselamatan masyarakat manusia, contohnya Islam memiliki kriteria atau ukuran ketika ingin melantik seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala Negara maupun kepala daerah adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang suatu amanah.⁸²

Ketika golongan sekuler melempar undang-undang Islam jauh-jauh, dengan anggapan ajaran Islam tidak relevan pada saat ini. Mereka tidak mengetahui, kemajuan politik macam mana pulakah yang akan terhalang apabila para pemimpin yang duduk memegang kekuasaan dari jenjang terbawah sampai jenjang tertinggi, baik di pemerintahan maupun pada partai politik diharuskan berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Menurut Natsir bila sudah ada aturan atau sistem undang-undang yang baik terdapat di negara lain, kita orang Islam berhak mencontohnya selama tidak bertentangan dan berlawanan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Islam.⁸³

⁸² Ibid, 24.

⁸³ Muhammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001), hal

D. Debat Soekarno Tentang Pancasila

Dimulai dari perdebatan antara Ir. Soekarno dengan Moh. Natsir yang saat itu mempunyai pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Ketika itu polemik pemikiran Ir. Soekarno yang berkeinginan memisahkan antara agama dan negara, sedangkan Moh. Natsir berkeinginan mendirikan negara nasional yang berdasarkan Islam, karena banyaknya penganut agama Islam di Indonesia. Perbedaan inilah yang memulai perdebatan tentang dasar-dasar negara.

Pada awalnya Moh. Natsir dan para pengikutnya sudah agak dilegakan dengan munculnya Piagam Jakarta yang memuat penyatuan agama dengan negara yang tertera dalam sila pertama. Kemudian rumusan Piagam Jakarta inilah yang sudah disepakati oleh seluruh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai sila-sila yang akan tertera di Pancasila.⁸⁴

Namun pada saat akan dibacakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno dipanggil untuk menemui Laksamana Maeda. Saat itu Laksamana Maeda mengutarakan kekhawatirannya tentang penyatuan agama yang tertera pada salah satu sila di rumusan tersebut. Karena, Indonesia terdiri dari banyak agama di dalamnya. Kemudian dalam tempo yang sangat singkat Ir. Soekarno pun merubah rumusan tersebut. Perubahan inilah yang sedikit mengecewakan harapan kelompok-kelompok Islam. PPKI dan Ir. Soekarno dianggap melakukan kesalahan dengan mementingkan kelompok minoritas (non-islam) dan mengorbankan kepentingan kalangan mayoritas (umat Islam). Rasa tidak puas

⁸⁴ Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta Yayasan Idayu 1975), 8.

oleh beberapa kalangan itulah yang memunculkan persoalan baru pada awal kemerdekaan.⁸⁵

Pada awal kemerdekaan pernah ada usulan untuk namanya panca dharma, tetapi dengan tegas Soekarno menyatakan bahwa —Pancasila artinya azas atau dasar, dan di atas dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Pidato inilah yang memacu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk membentuk lagi suatu panitia kecil yang terdiri dari sembilan (9) orang untuk mengembangkan berbagai usulan yang masuk mengenai kemerdekaan Indonesia. Kesembilan orang yaitu: Abdul Kahar Muzakkir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso (dari golongan Islam); Soekarno, Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, dan Subardjo (dari golongan nasionalis). Alasan mendasar dibentuknya tim 9 yang diketuai oleh Soekarno itu adalah karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bahkan menimbulkan dua kubu atau faksi yang tetap bersitegang untuk menginginkan prinsip kebangsaan sebagai dasar negara. Perbedaan ini bermuara pada cara pandang dalam memposisikan hubungan negara dan agama. Menurut Prof. Ahmad Syafii Maarif, dari 68 orang anggota BPUPKI, hanya 15 orang saja yang benar-benar bisa mewakili aspirasi politik dan ideologi umat Islam. Anggota BPUPKI di luar 15 orang itu dikatakan bersepakat untuk menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kebuntuan inilah yang sebetulnya melahirkan panitia sembilan (tim 9) untuk mencari solusi soal dasar negara.⁸⁶

⁸⁵ Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta Yayasan Idayu 1975), 9.

⁸⁶ Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*, (Bandung, 1980), 8-9.

Pekerjaan panitia kecil inilah tersusun suatu naskah pembukaan yang dikenal sebagai *gentlement agreement* di antara para pendukung paham nasionalisme dan pendukung Islam. Kesepakatan inilah yang oleh Moh. Yamin disebut sebagai *Djakarta Charter* yang selanjutnya naskah tersebut dikenal sebagai *Piagam Jakarta*.⁸⁷ Isi *Piagam Jakarta* adalah sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,

⁸⁷ Ahmad Mansur Suryanegara, *API Sejarah 2*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama 2010), 163.

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸⁸

Sebetulnya perdebatan seputar dasar negara Indonesia yang merdeka itu, baik dalam BPUPKI maupun tim 9 bukan mengenai nama dasar negaranya, sebab sudah disepakati bersama adalah Pancasila. Tetapi perdebatan justru terkait pada isi sila-silanya. Perdebatan tersebut justru ditimbulkan oleh perbedaan pendapat dari golongan yang menginginkan agar kelak negara Indonesia adalah negara Islam, tetapi disanggah oleh anggota lain yang berpaham nasionalisme.⁸⁹

Perbedaan ini justru mendapat titik temu lewat rancangan Pembukaan Hukum Dasar (preamble hukum dasar) yang kemudian dilaporkan hasil kerjanya dan diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1945 ditetapkan sebagai hari terbentuknya Piagam Jakarta. Adapun naskah Piagam Jakarta sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 di atas adalah:

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut dasar) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

⁸⁸ SoeriSoeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 427-428.

⁸⁹ *Ibid*, 429.

5. (serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁰

Sejak penetapannya telah disepakati oleh kelompok Islam dan kelompok kebangsaan bahwa negara pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti agama, melainkan negara ketuhanan yang memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat.

Golongan Islam awalnya menolak, tidak senang dengan usul membangun Indonesia merdeka atas dasar pancasila, tetapi akhirnya dapat menerimanya. Mereka menolak negara anti agama, tetapi dapat menerima negara pancasila yang berketuhanan, sedangkan golongan kebangsaan negara agama, tidak dapat menerima negara ketuhanan.

Penulis ingin mengutip pidato Soepomo yang juga memperlihatkan perdebatan seputar isi Piagam Jakarta itu, demikian oleh anggota yang terhormat, tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. memang di sini terlihat ada dua paham, yaitu paham dari anggota-anggota yang ahli agama yang menginginkan supaya negara Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Anjuran lain sebagaimana telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Dengan lain perkataan: bukan negara Islam, apa sebabnya disini penulis menyatakan bukan negara Islam? perkataan: negara Islam lain artinya dari pada perkataan

⁹⁰ SoeriSoeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 429.

negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama, negara dan agama adalah satu, bersatu padu. Islam sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui ialah suatu sistem agama, sosial dan politik yang bersandar atas Alquran sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam. Jadi seandainya kita disini mendirikan negara Islam, tantangan pendirian itu akan timbul juga di masyarakat kita dan barangkali Badan Penyelidik inipun akan susah memperbincangkan soal ini. akan tetapi tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan.⁹¹

Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan lain itu, akan tetapi golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu, cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya dan juga yang dianjurkan oleh pemerintah.⁹²

Meskipun demikian perjalanan panjang hingga terbentuknya Piagam Jakarta masih dalam tanggung jawab panitia persiapan kemerdekaan (PPKI) dan persiapan-persiapan menjelang kemerdekaan melalui rapat-rapat khusus seksi

⁹¹ Samsul munir Amin, *sejarah peradaban Islam*, (Jakarta: Amzar, 2010), 410.

⁹² Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), 16.

ketatanegaraan, terutama mempersiapkan Undang undang dasar dan pembukaannya terus berlanjut hingga tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses menuju kearah itu, kontraversi terkait Piagam Jakarta masih terus ada.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut yang mengaku membawa aspirasi masyarakat Indonesia bagian timur (yang mayoritas Kristen dan katolik) yang keberatan dengan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya dikatakan bahwa jika tidak dipertimbangkan kembali, maka Indonesia bagian timur tidak akan mau bergabung dengan negara Indonesia. Sebetulnya desakan demikian pernah disampaikan oleh salah seorang tokoh dari Maluku yaitu Mr. Latuharhary yang memprotes Piagam Jakarta dalam sidang BPUPKI. Bahkan Soekarno dan Wachid Hasyim membela Piagam Jakarta. Termasuk Ki Bagus Hadikusumo pun bersikeras untuk mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu. Namun berkat upaya dari Kusman Singodimedjo yang mendekati wakil-wakil Islam sajalah akhirnya kelompok Islam bisa menerima dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu.⁹³

⁹³ Ahmad Mansur Suryanegara, *API Sejarah 2*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama 2010), 165.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mencari berbagai sumber seperti melalui perpustakaan, jurnal, maupun materi-materi yang berkaitan dengan judul. Adapun hasil uraian dan analisa data diperoleh penulis dapat disimpulkan bahwa:

- a. Mohammad Natsir diakui sebagai tokoh handal sebagai Pemikir, Intelektual, Pujangga, dan Negarawan. Ia tidak hanya terampil menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun ia bertindak secara nyata. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno, yang disebabkan karena Soekarno yang menganut paham nasionalisme mengkritik Islam sebagai ideologi seraya memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Ataturk di Kesultanan Utsmaniyah, sedangkan Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno bahwa dia kurang memperhatikan kesejahteraan di luar Pulau Jawa.
- b. Polemik antara Muhammad Natsir dan Soekarno tentang hubungan agama dan **negara memang** cukup tajam. Disaat Soekarno menyatakan bahwa tidak ada ijma

ulama yang menyatakan bahwa agama dan negara harus bersatu, maka Muhammad Natsir kemudian menjawab pernyataan tersebut dengan mengatakan "Mana pulakah ijma-ijma ulama yang mengatakan agama dan negara tidak harus bersatu?" Dari pernyataan tersebut dapatlah dipahami bahwa Muhammad Natsir menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara. Muhammad Natsir beranggapan bahwa negara membutuhkan Islam seperti dalam pernyataannya. Hanyalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. ialah beberapa patokan untuk mengatur negara, supaya negara itu menjadi kuat dan subur, dan boleh menjadi wasilah yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang berhimpun dalam negara itu, untuk keselamatan diri dan masyarakat, untuk kesentosaan perseorangan dan kesentosaan umum. Gagasan Muhammad Natsir tentang Islam dan negara banyak diungkapkan dalam tulisan-tulisan beliau pada majalah Pembela Islam dan Pandji Islam. Pengungkapan gagasan-gagasan yang dimuat dalam berbagai tulisan tersebut menunjukkan kapabilitas beliau sebagai seorang intelektual dan pemikir. Sehingga, gagasan yang dihidirkannya ke dalam bentuk ilmiah tersebut dapat diuji kebenarannya dan dapat diterima oleh berbagai kalangan luas.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Agar kiranya pihak kampus memaksimalkan sumber-sumber informasi mengenai tokoh-tokoh pejuang politik dan pelalu sejarah di Indonesia.
2. Perpustakaan merupakan tempat untuk memperoleh informasi tentang segala macam jenis pembelajaran dan materi, sekiranya dapat dijadikan

tempat yang nyaman ketika pengunjung atau pembaca dapat melakukan aktivitasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 2015.
- Agustian, T. Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir 2020.
- Basyaib, Hamid. Perjalanan Politik Islam dari Prapemilu sampai Pemilihan Presiden. Pustaka Alvabet 1999.
- Berlian, P. S. Ideologi Islam dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia Luthfi Assyaukanie 2004.
- EFENDI, BUJANG. Etika Politik Islam Indonesia: Studi atas Konsep dan Aksi Politik M. Natsir. Bandung :Uin Raden Fatah Palembang, 2017.
- Falah, Saiful. Rindu pendidikan dan kepemimpinan M. Natsir. Republika, 2012.
- Faqieh, Moh, and Raji Mukhtaral. Sastra sebagai transmisi untuk membentuk nilai keislaman dan nasionalisme rakyat Indonesia. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Fauzan, P. I. Negara Pancasila vis-a-vis Negara Islam: Pemikiran Politik M. Natsir dan M. Isa Anshary, Garut: STAIPI Garut Press, 2009.
- Iqbal, Amin Nasution. Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer Edisi Ketiga. Medan: Gramedia, 2010.
- Ishak, N. Pergerakan Partai Masyumi Di Indonesia 1945-1960. Jakarta: Cyber Media, 2009
- Iskandar, I. Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam dan Negara. Yogyakarta: Jurnal Transnasional, 2015.

- Luth, T. Dan M. Natsir, dakwah dan pemikirannya. Surabaya: Jurnal, 1999.
- Mashad, D. Mencari kembali harmoni yang hilang. Bali: Pustaka Al Kautsar, 2014.
- Abid Al-Jabiri, Muhammad. Tahun Mohammad Natsir Berdamai Dengan Sejarah Jakarta: Republik, 2008.
- Basir Syam, Muhammad. Sinergitas Pemikiran Natsir Di Bidang Teologi, Pendidikan Dan Politik: Suatu Kajian Perspektif Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ,2016.
- Lager Onderwijs, Meer Uitgebreid. Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan Bandung: CV. Ilmu, 2017.
- Natsir, Fauzie, Ahmad, Kenangan Tentang Aba dalam Lukman Hakiem 2010.
- Pajriah, S. Pemikiran Mohammad Natsir tentang Hubungan Agama dan Negara serta Polemiknya dengan Soekarno. Bandung: Jurnal Artefak, 2017.
- Purwono, D. Peran Mohammad Natsir Pada Masa Demokrasi Parlementer Tahun 1950-1958. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.
- Raihan, R. Kepemimpinan Mohammad Natsir di Dewan Daa Wah Islamiyah Indonesia. Medan: Jurnal Al-Bayan, 2013.
- Ridwan, Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Prespektif Pemikiran Hasan Al-Banna. Universitas Muhammadiyah Malang: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2017.
- Suharsi, Arikunto. Prosedurn Penelitian Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.**

Sukmadinata, Nana Syaodi. Metode Penelitian. Bandung: Remaja Rosdakarya
2011.

BIODATA PENULIS

Nama : Akbar Mukaddam

Tempat, Tanggal Lahir : Siniu, 31 Januari 2001

Nim : 19.2.17.0009

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Motto Hidup : Biarkan Pemikiranmu Berbahaya asal Bahayanya Adalah Mencerdaskan

Pengalaman Organisasi : Anggota RPB Sulteng 2020, Anggota HMJ PPI 2020, Anggota Dema Universitas 2023, dan Anggota LBC Kota Palu 2022.

Hobby :

DOKUMENTASI



Gambar 1



Gambar 2

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 792 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor : 456 Un.24/KP.07.6/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Menunjuk Saudara :

1. Hj. Nurhayati, M.Fil.I.
2. Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :

Nama : AKBAR MUKADDAM
NIM : 19.2.17.0009
Prodi : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (S1)
Semester : VII (Tujuh)
Tempat/Tgl lahir : Siniu, 31 Januari 2001
Judul Skripsi : PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

Pembimbing Skripsi bertugas :

1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.

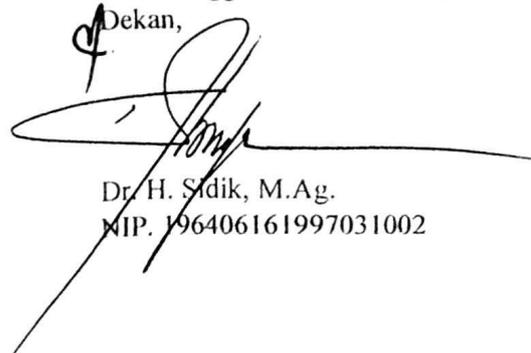
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.

NIP. 196406161997031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 2424 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- dipandang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini
- b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu,
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu,
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041606/B.11/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB
DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

PERTAMA

Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A
Pembimbing I	: Dr. Hj. Nurhayati, M.Fil.I
Pembimbing II	: Noorwahid Sofjan, S.IP., M.A.
Penguji Utama	: Dr. H. Sidik M.Ag

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Akbar Mukaddam
NIM	: 19.2.17.0009
Jurusan	: Pemikiran Politik Islam (PPI)

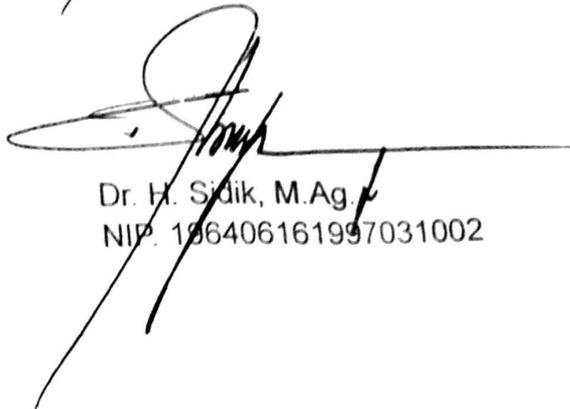
Judul Proposal : PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

- KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

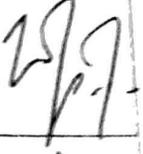
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

LEMBAR KONTROL
KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL

NO	MAHASISWA YANG DI UJI	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	NAMA DOSEN PENGUJI	TTD PIMPINAN SIDANG
1	ASRIYATI	Pola Komunikasi Orang-orang pada Pembinaan Anak-anak Siswa SMP & SMA	1. Samsing S. Ag. 2. Taufik S. S. Mpd	
2	Husain Dj Ahmad	Komunikasi antar Budaya di Pondok Pesantren Al-Falah Cabang Tambora	1. Taufik S. S. Mpd 2. Dr. Adam, Mpd. Psi	
3	Ruhdar	Pendudukan dan Peran perempuan dalam Politik Islam	1. Dr. Muhtadin Al-Mustafa, M. Pd. 2. Siti Rubiatul M. Pd. M. Pd.	
4	Ghufran Arsyah Pratiwi	Strategi Siskem dalam meningkatkan Pemahaman Teori Remaja Masjid di Tib. I	1. Dr. Rudi, S. Ag. M. Pd. I 2. Samsing, S. Ag. M. Ag.	
5	Yakob	makna dan simbolik Ritual masyarakat Masyarakat suku Lampung di kot. Purwokerto	1. Taufik S. S. Mpd 2. Harpuha Cua S. Kom. I. Mpd	
	Syarifah Imaningsih		1. 2.	
6	Rajab	Komunikasi antar budaya antara Strager dan host Culture Baleno	1. Muhammad Nugroho S. Sos. M. Kom. 2. Dr. Syarifurri S. Ag. M. Ag.	
			1. 2.	
			1. 2.	
			1. 2.	